

kemudian mengumumkan 48 partai yang lolos dan dinyatakan berhak mengikuti Pemilu 1999. Dari 48 partai politik tersebut, terdapat 18 partai yang menggunakan asas, simbol, dan berbasis massa Islam (Nasiwan, 2003: 244).

Dalam penelitian ini, meskipun terdapat dua partai politik Islam yang berhasil menarik perhatian kader dan struktur pimpinan Persatuan Ummat Islam pada Pemilu setelah Soeharto *lengser*, yaitu: Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan, untuk mencermati pilihan politik masa depan Persatuan Ummat Islam, dipandang perlu dikemukakan dua partai Islam lainnya, yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Pemilihan pada kedua partai politik Islam yang disebut terakhir, karena kelahiran keduanya sering dihubungkan dengan dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menelusuri keterkaitan organisasi massa Islam dengan partai politik yang diinisiasinya, akan menjadi alat timbang bagi Persatuan Ummat Islam. Selanjutnya dipandang perlu dikemukakan tingkat kemampuan partai-partai politik Islam dalam Pemilihan Umum 1999, 2004, dan 2009 di Indonesia. Mampukah partai-partai Islam meraih suara signifikan pada perhelatan nasional tersebut? Penelusuran ini pun menjadi penting guna mencermati kecenderungan politik masa depan Persatuan Ummat Islam, akan tetap sebagai organisasi massa Islam independen atau berpaling menjadi partai politik? Mengapa dan bagaimana?

Berdasarkan urutan pendiriannya, Partai Bulan Bintang dipandang sebagai partai politik Islam pertama yang didirikan setelah Presiden Soeharto *lengser*. **Partai Bulan Bintang** didirikan pada 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada 26 Juli 1998 di Mesjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta.

Inisiator berdirinya Partai Bulan Bintang adalah para tokoh yang tergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan perpanjangan tangan dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan 1 Agustus 1989 oleh para *inohong* Masyumi, seperti: Natsir, Rasyidi, Masykur, Rusli Abdul Wahid, Noer Ali, Anwar Hardjono, Anwar Shaleh, Yunan Nasution, dan Hasan Basri (*Portal Resmi PBB*. 2008. "Sejarah Singkat Partai Bulan Bintang" dalam <http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/>. Diakses Diakses, 22 Desember 2012, pukul 03.09 WIB). Menurut Nasiwan (2003: 252), para pendiri Partai Bulan Bintang terdiri dari 22 organisasi massa Islam tingkat nasional dan 18 tingkat daerah.<sup>51</sup>

Setelah berdirinya Partai Bulan Bintang kemudian didirikan Partai Keadilan. Partai Keadilan berawal dari sebuah gerakan dakwah. Seiring bergulirnya era reformasi, perjuangan dakwah yang telah dirintis para kader sebelumnya dipandang perlu untuk ditindaklanjuti. Perjuangan untuk merealisasikan cita-cita dari spirit dakwah Islam masih panjang mengingat mayoritas kaum Muslim di Indonesia berada dalam keterbelakangan, kemiskinan, ketidaksejahteraan, serta kurangnya penumbuhan kepribadian Islami. Karena itu, mereka (para aktivis dakwah) berkesimpulan, bahwa momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk meraih cita-cita dakwah dengan mendirikan partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam (Ismail, 1998: 32). Partai politik dimaksud kemudian diberi nama Partai Keadilan, didirikan pada 20 Juli 1998, tiga hari setelah berdirinya Partai Bulan Bintang. Partai Keadilan kemudian dideklarasikan 9 Agustus 1998 di mesjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta. Menurut Ismail (Presiden pertama Partai Keadilan,

pada prosesi deklarasi Partai Keadilan dihadiri + 50.000 pendukung (Ismail, 1998: 29).

Pada perjalanannya, seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang memuat syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada Pemilu 2004 (*system parliamentary threshold*) 2% (dua persen), Partai Keadilan karena raihan suara pada pemilu 1999 kurang dari yang disyaratkan, mereka harus memperbaharui namanya untuk dapat kembali ikut menjadi peserta Pemilu. Karena itu, para kader melakukan pembenahan, baik internal maupun eksternal partai sesuai dengan yang disyaratkan. Untuk keperluan itu, para kader juga menambah nama Partai Keadilan dengan kata "Sejahtera" (S). Pada 2 Juli 2003, seluruh tahapan proses verifikasi di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD Kabupaten/Kota) selesai dilakukan. Satu hari kemudian, tepatnya pada 3 Juli 2003, Partai Keadilan menyatakan diri bergabung dengan PK-Sejahtera. Dengan penggabungan tersebut, seluruh hak milik Partai Keadilan menjadi milik PK-Sejahtera, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan tersebut, Partai Keadilan secara resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) atau lebih populer PKS (*Portal Resmi PKS*. 2011. "Sejarah Ringkas" dalam <http://www.pks.or.id/content/sejarah-ringkas>. Diakses, 22 Desember 2012, pukul 02.22 WIB).

Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa dapat dicermati pada *testimoni* "Buku Putih Islah Akbar PKB" yang diterbitkan oleh Komite *Tashaluh* pada 2010, sebagai berikut:

“Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sebuah institusi politik yang secara kelembagaan dilahirkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 23 Juni 1998. Sebuah partai yang dilahirkan dengan semangat dan motivasi untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan kaum Nahdliyin yang selama Orde Baru menjadi “korban” berbagai kebijakan penguasa saat itu. Atas dasar semangat itulah, PKB lahir dengan memikul segudang harapan dan cita-cita besar dari ulama dan kiai. Dengan kata lain, PKB merupakan sayap politik yang bertugas menjaga sekaligus memperjuangkan kepentingan serta aspirasi kaum Nahdliyin agar bisa mengoptimalkan khidmat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Komite *Tashaluh*, 2010: 5).

Diakui oleh para pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 pada 8-12 Desember 1984 di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukerojo, Asembagus, Situbondo Jawa Timur menetapkan secara organisatoris Nahdlatul Ulama tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis (PBNU, 1984: 71-72). Namun seiring *lengser keprabon* Soeharto, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) banyak mendapatkan usulan dari warga Nahdliyin di seluruh tanah air. Di antara usulan itu, terutama agar PBNU segera membentuk partai politik (parpol). Paling tidak, tercatat 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa (*Portal Resmi DPP PKB*. 2010. “Sejarah Pendirian” dalam <http://www.pkb.or.id/sejarah-pendirian>. Diakses, 22 Desember 2012, pukul 02.12 WIB).

Menyikapi hal tersebut, pada rapat harian *Syuriyah* dan *Tanfidiyah* PBNU 3 Juni 1998, dihasilkan keputusan agar segera membentuk Tim Lima.<sup>52</sup> Untuk memperkuat posisi dan kemam-

puan kerja Tim Lima pada rapat harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU 20 Juni 1998, dibentuk pula Tim Asistensi.<sup>53</sup> Selanjutnya, pada 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat guna mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Rapat kedua tim dilanjutkan pada 26 - 28 Juni 1998 di Villa La Citra Cipanas Bogor untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik. Pertemuan Cipanas menghasilkan pokok-pokok pikiran mengenai reformasi politik, *mabda<sup>1</sup> Siyasiy* (prinsip-prinsip politik), hubungan partai politik dengan Nahdlatul Ulama (NU), AD/ART, dan Naskah Deklarasi. Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa kemudian dilaksanakan di Jakarta pada 23 Juli 1998 dengan para deklarator, masing-masing: Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, Musthofa Bisri, dan Muhith Muzadi (*Portal* Resmi DPP PKB. 1998. "Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa" dalam <http://www.pkb.or.id/naskah-deklarasi>. Diakses tanggal 1 Oktober 2013, pukul 13.33 WIB.).

Sementara itu, para inisiator berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Majelis Amanat Rakyat (MARA), Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) Yogyakarta, para tokoh organisasi massa Islam Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet, Jakarta. Dalam *Portal* Resmi PAN (2010: 1), disebutkan, pada pertemuan di Bogor 5-6 Agustus 1998, para inisiator sepakat mendirikan Partai Amanat Bangsa (PAB). Namun, meskipun belum ditemukan penjelasan tentang perubahan nama dari PAB ke PAN, kuat dugaan, nama "Bangsa" telah digunakan oleh partai Islam lainnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga nama "Bangsa" pada Partai Amanat Bangsa (PAB) kemudian diubah menjadi "Nasional". Tahap selanjutnya, setelah disepakati perubahan nama "Bangsa" menjadi "Nasional",

Partai Amanat Nasional (PAN) dideklarasasikan pada 23 Agustus 1998 di Jakarta oleh 50 orang tokoh nasional. Di antara para deklarator Partai Amanat Nasional, adalah: Amien Rais, Faisal Basri, Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan Alvin Lie Ling Piao (*Portal Resmi PAN*. 2010. "Sejarah Berdirinya PAN" dalam <http://pan.or.id/sample-page/sejarah-pan/>. Diakses, tanggal 22 Desember 2012, pukul 02.19 WIB.).

Dengan banyaknya tokoh Muhammadiyah yang menjadi deklarator Partai Amanat Nasional, muncul kesan, bahwa Muhammadiyah sebagai pendiri Partai Amanat Nasional. Bahkan hingga sekarang partai ini sering dihubungkan dengan organisasi massa Islam Muhammadiyah. Terkait dengan hal itu Muhammadiyah sebetulnya telah memberikan klarifikasi, sebagai berikut:

"Muhammadiyah dan PAN merupakan dua organisasi yang terpisah. PAN didirikan oleh individu-individu yang memiliki cara pandang yang sama tentang untuk apa partai itu didirikan. Adapun keterlibatan *elite* puncak Muhammadiyah, Amin Rais, dalam mendirikan PAN sudah menjadi hak pribadinya, tidak ada sangkut-pautnya dengan Muhammadiyah. Namun keterlibatan Amin Rais tersebut oleh sebagian pendukung PAN dianggap mendapat "restu" Muhammadiyah melalui Sidang Tanwir Semarang 1998, dan PP mengizinkan atas amanah Tanwir untuk melakukan *ijtihad* politik guna merespons perubahan politik yang berlangsung (Jurdi et. al. 2010: 315).

Namun meskipun sudah dijelaskan oleh Muhammadiyah, pilihan Amin Rais menjadi deklarator pendirian Partai Amanat Nasional bukanlah pilihan yang tanpa risiko. Sosok Amin Rais

sendiri bukan hanya sebagai sosok kekuatan moral bagi Muhammadiyah. Karena itu, ia segera dihadapkan dengan dua pilihan dilematis, yaitu: apakah masih akan tetap sebagai kekuatan moral, atau masuk ke dalam dunia politik praktis? Ketika pilihannya tetap sebagai kekuatan moral, berarti Amin Rais tetap menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dan berada pada wilayah *high politics*. Namun, apabila meneruskan gerakan reformasi melalui jalur politik praktis (*low politics*) dengan mengambil sikap mendirikan partai politik, maka jabatannya di Muhammadiyah harus dilepas (Jurdi *et al.* 2010: 315-316). Setelah melalui berbagai pertimbangan, Amin Rais akhirnya berijtihad untuk memilih Partai Amanat Nasional yang disebutnya sebagai eksperimen politik. Sementara itu, kelahiran Partai Amanat Nasional tidak memiliki hubungan dengan Muhammadiyah, sekalipun banyak pihak yang mengaitkannya. Hubungan keduanya lebih merupakan keterikatan moral-politik dan historis (Jurdi *et al.* 2010: 316-317).

Dalam rangka menegaskan tidak adanya keterkaitan Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional atau partai politik manapun, Amin Rais memberikan rambu-rambu yang harus dipedomani ketika warga Muhammadiyah akan terlibat dalam partai politik praktis, karena Muhammadiyah tidak mendirikan partai politik. Rambu-rambu tersebut, yaitu: (1) sampai kapan pun Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik, (2) secara kelembagaan Muhammadiyah tidak akan mendirikan partai politik, (3) jika warga Muhammadiyah akan memimpin sebuah partai politik, hendaknya tidak mengatasnamakan Muhammadiyah, tetapi dalam kapasitas sebagai pribadi (Jurdi *et al.* 2010: 316-317).

Pemilihan Umum (Pemilu) demokratis pertama setelah Soeharto *lengser* dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Sebagai pemenang Pemilihan Umum bukan lagi milik Partai Golongan Karya (P-Golkar), tetapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan raihan 35.689.073 suara. Partai Golkar menyusul pada urutan kedua dengan perolehan 23.741.758 suara, kehilangan

**Tabel 4.6**  
**Hasil Perhitungan Pembagian Kursi**  
**Anggota DPR RI Pada Pemilu 1999**

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA*	Kursi Dengan SA*
1.	PDI-P	35.689.073	153	154
2.	P-Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3

Keterangan: SA\* = *Stembus Accord* (Perjanjian Suara).

Sumber: Diolah dari Portal Resmi KPU Pusat. 1999: "Hasil Pemilu 1999" dalam [http://www.kpu.-go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.-go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42). Diakses, 26 September 2013, pukul 10.27 WIB.



205 kursi dibanding perolehan pada Pemilu 1997. Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 13.336.982 suara. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 11.329.905 suara, kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. Partai Amanat Nasional meraih 7.528.956 suara. Selanjutnya, Partai Bulan Bintang meraih 2.049.708 suara, dan Partai Keadilan meraih 1.436.565 suara. Berikut tabel urutan sepuluh besar partai pemenang Pemilu 1999 berdasarkan hasil perhitungan pembagian kursi:

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 terdapat banyak perbedaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 1999. Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 sering disebut sebagai eksperimen demokrasi Indonesia baru. Hal itu, karena pelaksanaan Pemilu 2004 merupakan Pemilu setelah dilakukan *amandemen* ke-4 UUD 1945. Melalui *amandemen* tersebut, struktur politik Indonesia diubah sedemikian rupa sehingga memengaruhi proses rekrutmen (penjaringan) *elite* politik nasional dan daerah<sup>54</sup> (*Portal Resmi PNRI*. 2004. "Pemilihan Umum Tahun 2004" dalam <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 13.45 WIB.).

Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dilaksanakan pada 5 April 2004, diikuti oleh 24 partai politik. Pada Tabel 4.7 dapat dilihat urutan sepuluh besar partai pemenang Pemilu 2004 berdasarkan hasil perhitungan pembagian kursi.

Pada Pemilihan Umum calon anggota legislatif 2009, jumlah partai politik peserta Pemilu meningkat bila dibandingkan dengan 2004. Pada Pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum pada tahap pertama meloloskan 34 partai politik dan 6 partai lokal di Aceh.<sup>55</sup> Dari ke-34 partai tersebut, 18 di antaranya merupakan partai baru. Selanjutnya pada 15 Agustus 2008,

**Tabel 4.6**  
**Hasil Perhitungan Pembagian Kursi**  
**Anggota DPR RI Pada Pemilu 2004**

No.	Nama Partai	Suara DPR	Prosentase	Kursi Dengan SA*
1.	P-Golkar	24.480.757	21,58	128
2.	PDI-P	21.026.629	18,53	109
3.	PKB	11.989.564	10,57	52
4.	PPP	9.248.764	8,15	58
5.	Demokrat	8.455.225	7,45	57
6.	PKS	8.325.020	7,34	45
7.	PAN	7.303.324	6,44	52
8.	PBB	2.970.487	2,62	11
9.	PBR	2.764.998	2,44	13
10.	PDS	2.414.254	2,13	12

Keterangan: SA\* = *Stembus Accord* (Perjanjian Suara).

Sumber: Diolah dari Direktori Partai Politik Indonesia. 2004. "Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI" dalam <http://partai.info/pemilu2004/hasilpemilulegislatif.php>. Diakses, 4 Oktober 2013, pukul 01.16 WIB.

setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan seleksi dan verifikasi lanjutan terhadap partai-partai lainnya, menetapkan empat partai tambahan sebagai peserta pemilu 2009.<sup>56</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) ketiga setelah era Soeharto digelar pada 9 April 2009. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20

Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan pada 19 April - 12 Mei 2009. Penetapan hasil Pemilu kemudian disahkan melalui Keputusan KPU Nomor 392/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009 (*Portal Resmi KPU. 2009. "Hasil Pemilu Anggota DPR,*

**Tabel 4.8**  
**9 Partai Politik Yang Lolos Dari *Parliamentary Threshold* Dan Perolehan Kursi Dalam DPR Pemilu Legislatif 2009**

No.	Nama Partai	Suara DPR	Prosentase	Kursi Dengan SA*
1.	Demokrat	21.703.137	20,85	150
2.	Golkar	15.037.757	14,45	107
3.	PDIP	14.600.091	14,03	95
4.	PKS	8.206.955	7,88	57
5.	PAN	6.254.580	6,01	43
6.	PPP	5.533.214	5,32	37
7.	PKB	5.146.122	4,94	27
8.	Gerindra	4.646.406	4,46	26
9.	Hanura	3.922.870	3,77	18

Keterangan: SA\* = *Stembus Accord* (Perjanjian Suara).

Sumber: Diolah dari Direktori Partai Politik Indonesia. 2009. "9 Partai Politik yang Lolos dari *Parliamentary Threshold* dan Perolehan Kursi dalam DPR Pemilu Legislatif 2009" dalam <http://partai.info/pemilu2009/> Diakses, 4 Oktober 2013, pukul 02.22 WIB.

DPD, dan DPRD” dalam [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku\\_h.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf). Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 14. 10 WIB.). Penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) secara nasional meliputi perolehan suara 38 partai politik untuk Anggota DPR, termasuk 6 partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 24 Mei 2009. Urutan sembilan besar partai pemenang Pemilu 2009 berdasarkan hasil perhitungan pembagian kursi dapat dilihat pada Tabel 4.8

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Partai Bulan Bintang (PBB) hanya memperoleh raihan +1,8 juta suara atau setara dengan 1,7%. Dalam urutan sepuluh besar partai pemenang Pemilu 2009, sebetulnya Partai Bulan Bintang (PBB) masuk sepuluh besar dengan menempati urutan kesepuluh. Namun dengan ditetapkannya sistim *parliamentary threshold* 2,5%, meskipun beberapa calon yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh dukungan suara dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota legislatif tingkat pusat, berakibat pada hilangnya wakil Partai Bulan Bintang (PBB) di legislatif tingkat pusat. Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pemilu 2009 hanya menempatkan para wakilnya di legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota sejumlah 400 orang (*Portal Resmi PBB*. 2008. “Sejarah Singkat Partai Bulan Bintang” dalam <http://bulan-bintang.org/partai/-sejarah-singkat/>. Diakses Diakses, 22 Desember 2012, pukul 03.09 WIB).

Dari rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, 2004, dan 2009 di atas, tampak bahwa tingkat elektabilitas dan kompatibilitas<sup>57</sup> partai-partai Islam cenderung tidak stabil serta mengalami penurunan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak stabil dan menurunnya tingkat elektabilitas dan kompatibilitas partai-partai Islam. *Pertama*, Islam di Indonesia lebih bersifat

kultural. Kesalehan seorang individu tidak selalu kompatibel<sup>58</sup> dengan aspirasi politiknya. *Kedua*, terdapat dua faktor yang saling memengaruhi di internal partai-partai Islam, yaitu terjadinya dis-orientasi ideologi<sup>59</sup> partai dan menurunnya citra para *elite* partai. Misalnya, terkait dengan beberapa skandal yang berakibat pada menurunnya kepercayaan publik. *Ketiga*, ungkapan klasik yang sering dihembuskan sejak era Soekarno dan Soeharto, yaitu pemikiran *konservatif* yang menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Masih terdapat kekhawatiran yang bukan hanya dilakukan oleh kaum nasionalis sekular, tetapi kaum Muslim sendiri, jika partai-partai Islam menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu), maka akan mengubah fundamental sistem politik negara menjadi tidak lagi demokratis, memberlakukan hukum Islam yang akan bertentangan dengan norma-norma dasar demokrasi, partisipasi, dan kewarganegaraan (Ridwan. 2013. "Elektabilitas Partai Islam dan Kompatibilitas Demokrasi" dalam Diakses, 15 Juni 2013 pukul 09.52 WIB). Keempat, pada partai-partai politik Islam terjadi krisis *figure* pemimpin yang bisa menyatukan visi keislaman sekaligus menghapus kesalahan masa lalu dengan melakukan rekonsiliasi murni. Lembaga Survei Indonesia (LSI) kesulitan untuk memprediksi prospek partai politik yang berlandaskan Islam dalam era pemilu selanjutnya (2014). Namun dari sejarah masa lalu yang mempunyai aroma tak sedap, sangat sulit dibayangkan bahwa seluruh partai politik yang berlandaskan Islam mau mempersatukan diri dalam suatu kepemimpinan nasional (*Portal Resmi LSI*. 2006. "Prospek Islam Politik di Indonesia" dalam <http://www.lsi.or.id/riset/143/prospek-islam-politik-di-indone-sia>. Diakses tanggal 21 Mei 2011, pukul 03.16 WIB.).

Hingga di sini, dalam hal keterkaitan organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, meskipun dapat disebut para tokoh organisasi mereka menjadi inisiator berdirinya partai politik Islam, secara tegas dinyatakan tidak ada kaitan antara organisasi massa Islam dengan partai politik Islam yang mereka dirikan. Khusus bagi Persatuan Ummat Islam, dari Mukhtamar PUI ke-1 hingga ke-12, tidak ditemukan pernyataan secara organisatoris yang menentukan pilihan pada salah satu partai politik tertentu. Pernyataan politik Persatuan Ummat Islam pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, menganjurkan agar kader dan jamaah Persatuan Ummat Islam menyalurkan suara politiknya pada partai-partai politik Islam, bukan pada partai politik tertentu. Pernyataan dan sikap politik Persatuan Ummat Islam secara kelembagaan baru diungkap pada deklarasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, pada 10 Februari 2008. M.A. Rifa'i menyatakan sebagai berikut, "Kami independen, tapi bukan berarti tidak memilih yang baik di waktu yang baik kepada orang yang terbaik" (*Intisabi*, 2009: 54).

Agaknya, Persatuan Ummat Islam menyadari arti "persatuan ummat", sebagaimana yang telah digariskan Ahmad Sanoesi pada 1937 dan 1939. Sama seperti pada 1937 dan 1939, saat ini sudah terlalu banyak partai politik, termasuk partai Islam. Persatuan Ummat Islam tidak perlu membuat persaingan baru dengan partai-partai yang sudah ada. Di samping itu, dengan tanpa menjadi partai politik pada kenyataannya sejumlah kader dan jamaah Persatuan Ummat Islam telah mengambil bagian dalam partai-partai politik itu. Selain itu, dalam Anggaran Dasar (AD) Persatuan Ummat Islam, pasal Pasal 4 Tujuan. "Tujuan Perhimpunan adalah terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan peradaban yang diridhai Allah

*Subhanahu wa Ta'ala*”, kader dan jama'ah Persatuan Ummat Islam harus menghormati disiplin partai-partai politik yang telah ada. Persatuan Ummat Islam tidak mengharapkan setiap kader dan jama'ahnya yang telah memasuki partai tertentu menjadi bingung akibat Persatuan Ummat Islam berubah menjadi partai politik. Dengan *flat form* yang sudah dituangkan dalam Anggaran Dasar Persatuan Ummat Islam hasil Muktamar PUI ke-12 tahun 2011, Persatuan Ummat Islam memberi kebebasan kepada kader dan jama'ahnya dalam menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai-partai yang sudah dipilihnya sendiri (DPP PUI, 2010<sup>a</sup>: 2).

---

## Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Konferensi Besar dilakukan sehubungan dengan meninggalnya A. Karim Halim, Ketua Umum PB PUI hasil Muktamar PUI ke-8 pada 26 Pebruari 1990 di Jakarta. Menyikapi hal itu, kemudian diadakan Sidang Pleno PB PUI bulan Maret 1990. Hasil Sidang Pleno memutuskan, menunjuk Afandi Ridwan sebagai Pejabat Sementara Ketua Umum. Selanjutnya, dalam Konferensi Besar Persatuan Ummat Islam yang dilaksanakan pada 14-16 Sya'ban 1411/1-3 Maret 1991 di Majalengka ditetapkan Afandi Ridwan sebagai Ketua Umum PB PUI untuk periode (sisa) 1989-1994 (PP PUI, 2008: 32-33).
- <sup>2</sup> Pembentukan Majelis Syura dan pengangkatan Ketua Majelis Syura beserta pemilihan sebagian Anggota Majelis Syura, untuk pertama kalinya dilakukan dan ditetapkan dalam Muktamar PUI ke-12 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada 25-27 Desember 2009 (DPP PUI, 2010<sup>b</sup>: 1).

<sup>3</sup> Dalam bentuk organisasi terdapat pola hubungan kerja dan kewenangan, meliputi: wewenang lini (*line authority*), wewenang staf (*staff authority*), dan wewenang fungsional (*functional authority*). Wewenang lini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Wewenang staf adalah wewenang yang membantu agar seseorang yang memiliki wewenang lini dapat bekerja efektif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang dalam sebuah organisasi agar dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada dalam organisasinya atau organisasi lain. Persatuan Ummat Islam dalam mencapai tujuan organisasinya tidak dibebankan kepada salah satu individu, tetapi menjadi tanggungjawab bersama. Dengan demikian, pencapaian tujuan organisasi bukan hanya tanggungjawab lini, tetapi kompromi antara lini-staf dan fungsional (Mulianto *et al.*, 2006: 57).

<sup>4</sup> Mewakili pemerintah Republik Indonesia, Tri Sutrisno dalam sambutannya menegaskan antara lain:

“ ... dalam pembangunan jangka panjang kedua ini, kita menghadapi berbagai ragam tantangan dan kendala maupun peluang, yang menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki keandalan dalam kadar intelektual dan profesionalismenya; keluhuran dalam akhlak dan budi pekertinya; ketangguhan dalam wawasan dan semangat kebangsaannya serta ketegaran dalam kondisi fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, bidang kegiatan yang digeluti oleh Persatuan Ummat Islam yang berhubungan dengan pendidikan, da'wah dan kegiatan sosial sungguh tepat, karena sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan kita saat ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Disinilah diharapkan Persatuan Umat Islam dapat berperan lebih aktif, kreatif dan antisipatif, dengan mengacu kepada semangat “*fastabiqul khairat*”. Marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik, bagi kesejahteraan masyarakat, dalam arti yang seluas-luasnya, lahiriah dan *batiniyah, fi dunya wal-akhirat*. ... Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT., dengan ini Muktamar PUI ke-9 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bermuktamar”.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum P.B. Persatuan Ummat Islam, Afandi Ridwan dalam sambutannya, memberi pesan terkait tahun



baru Hijriah dan peran Persatuan Ummat Islam ke depan, sebagai berikut:

“... momentum pergantian tahun Hijriyah ini diharapkan dapat menjadi *tadzkirah* dan motivasi bagi peningkatan amaliyah Persatuan Ummat Islam. *Insy Allah* program-programnya akan diputuskan dalam Mukhtamar PUI ke-9 ini. Momentum awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II oleh Persatuan Ummat Islam dapat dijadikan pedoman dan fasilitator bagi kegiatan-kegiatannya dalam meningkatkan peran dan kiprahnya turut membangun bangsa yang bagian terbesarnya adalah ummat Islam. Oleh karena itu, hendaknya Mukhtamar PUI ke-9 dapat menjabarkan aspek-aspek program nasional ke dalam rumusan program organisasi yang relevan” (PP PUI, 2008: 40-41).

<sup>5</sup> Menurut Zaidi, gagasan agar Wanita dan Pemuda Persatuan Ummat Islam menjadi lembaga atau badan otonom pertama kali dilontarkan oleh Heryawan yang ketika itu menjadi Ketua Majelis Pemuda Persatuan Ummat Islam dalam rapat harian Pengurus Pusat PUI. Gagasan itu kemudian diperkuat oleh Zaidi dan Nazar Haris yang sama-sama menjadi anggota Majelis Pemuda. Ketua Majelis Wanita, Husmiyati yang hadir dalam rapat itu juga mendukung gagasan tersebut (Wawancara dengan Nurhasan Zaidi pada Sabtu, 29 Juni 2013 di Gedung P4TK IPA Jl. Diponegoro No. 12 Bandung, pukul 12.30-12.45 WIB.).

<sup>6</sup> Dalam sejarah pemikiran Islam, kemunculan kelompok *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* merupakan reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah dan sikap mereka dalam menyiarkan ajaran-ajarannya. Dalam pandangan kelompok ini, kaum Mu'tazilah tidak begitu banyak berpegang pada sunnah atau tradisi, bukan karena mereka tidak percaya pada tradisi Nabi dan para sahabat, tetapi karena mereka ragu terhadap orisinalitas hadis-hadis yang mengandung sunnah atau tradisi dimaksud. Dalam pandangan kelompok *Ahli Sunnah wal Jama'ah*, kelompok Mu'tazilah merupakan kelompok minoritas, sedang *jama'ah* adalah mayoritas (jumlah besar atau khalayak ramai). Pada perjalanannya, kelompok *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* diidentikan dengan pengikut setia imam Asy'ary (Asy'ariyah) dan Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi (Al-Maturidiyah) (Nasution, 1986: 61-64).

<sup>7</sup> Sikap seperti itu sebetulnya sudah dilakukan Halim pada Kongres Persjarikatan Oelama ke-15 di Majalengka pada 14-18 April 1938. Ahmad Ambary yang sebelumnya sebagai pimpinan Majelis Penyiaran Ilmu PB

PO, kemudian dipilih sebagai *Hoofdbestuur* Persjarikatan Oelama. Dalam sejarah Persjarikatan Oelama, Kongres PO ke-15 kemudian dikenal sebagai kongres Dewasa. Hal itu kemudian dilakukan ulang pada Kongres PUI ke-11 yang dilaksanakan 8-11 Desember 2004. Atas kerelaan para kader Senior Persatuan Ummat Islam, Heryawan yang sebelumnya sebagai Ketua Majelis Pemuda Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam, kemudian dipilih sebagai Ketua Umum Harian Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam (Wanta, 1991<sup>8</sup>: 20; DPP PUI, 2010: 13-14).

<sup>8</sup> Mayoritas kaum Muslim Indonesia meyakini, bahwa eksistensi Islam akan nyata apabila suatu Negara telah mampu menjamin tersktualisasikannya syari'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan bukan tujuan akhir dari gerakan nasionalis Islam, melainkan sampai terbentuknya negara yang diatur menurut sistim kenegaraan Islam. Paling tidak, wacana pemikiran politik Islam dalam konteks historis Indonesia pada awal-awal kemerdekaan sampai 1960 mengarah ke keyakinan seperti itu. Namun, secara faktual gerakan tersebut belum menunjukkan kesuksesannya. Bahkan gerakan tersebut menyebabkan hubungan tidak harmonis antara Islam dengan Negara yang berakhir dengan kebuntuan, permusuhan ideologis dan politis, dan bahkan kekerasan. Keadaan itu jelas semakin mempersempit ruang gerak dakwah kaum Muslim. Faktanya, Orde Baru tidak mau merehabilitasi Masyumi. Bahkan secara kasat mata pula, Orde Baru menampakkan sikap "Islamophobia", suatu sikap yang sangat menyakitkan bagi aktivis dakwah kaum Muslim. Situasi dan kondisi seperti itu sangat dirasakan Persatuan Ummat Islam sebagai salah satu "mantan" anggota Istimewa Masyumi. Sehingga gerakan dakwah Persatuan Ummat Islam, benar-benar jalan ditempat. Pada masa inilah banyak di antara aktivis dakwah Persatuan Ummat Islam yang memilih posisi diam (Noer et. al.,: 1999: 242-243).

<sup>9</sup> Buku ini diedit oleh Sulhan et al., dan diberi kata pengantar oleh Heryawan. Buku ini diterbitkan Departemen Dakwah dan Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam pada 2005. Buku setebal 76 halaman itu dibagi dalam 11 Bab, berisi tentang: (1) Aqidah Islamiyah, (2) Tauhid, (3) Iman kepada Allah, (4) Dua Kalimah Syahadat, (5) Iman kepada Malaikat, (6) Iman kepada Kitab-kitab Allah, (7) Iman kepada Para Rasul Allah, (8) Iman kepada Hari Akhir, (9) Iman kepada Taqdir, (10) Konsep Al-Wala' dan Al-Bara', dan (11) Hal-hal yang Merusak Aqidah. Secara umum buku ini menegaskan keberpihakan Persatuan

Ummat Islam pada konsep wawasan *Ahl Sunnah wa al-Jama'ah*.

- <sup>10</sup> Buku saku setebal 55 halaman itu berisi kumpulan pidato pada *Launching Peringatan Seabad PUI*, masing-masing: *Dengan Momentum ini, Kita harus Tumbuh* (Nurhasan Zaidi, Ketua PP Pemuda PUI/Ketua Panitia Peringatan Satu Abad PUI), *PUI adalah Gerakan Perbaikan Terus-menerus* (M.A. Rifa'i, Ketua Dewan Pembina PP PUI), *Kebangkitan dimulai dengan Memperbaiki Paradigma kita* (Ahmad Heryawan, Ketua Umum PP PUI/Gubernur Jawa Barat), di bagian akhir buku itu disajikan tentang sejarah singkat Persatuan Ummat Islam. Buku saku yang diterbitkan oleh Panitia Seabad PUI pada 2009 itu lebih mengarah pada *spirit* yang harus selalu tumbuh di kalangan kader dan jamaah Persatua Ummat Islam.
- <sup>11</sup> Buku berjudul lengkap *Dzikrullah Hayatul Qulub al-Ma'tsurat 'an Nabiy SAW.*, diterbitkan oleh Departemen Dakwah dan Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam pada 2008. Buku saku setebal 29 halaman itu berisi tentang: pentingnya dzikrullah, dzikrullah pagi dan sore, dzikir menghidupkan hati, shalawat dan do'a-do'a. Buku itu diharapkan dijadikan panduan do'a ringkas bagi jama'ah Persatuan Ummat Islam.
- <sup>12</sup> Buku saku setebal 14 halaman ini adalah uraian ceramah pada "Silaturrahim Akbar" Persatuan Ummat Islam di Puri Khatulistiwa Jatiningor pada 3 Oktober 2009. Buku ini diterbitkan oleh Panitia Seabad PUI.
- <sup>13</sup> Penetapan Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam tentang pelaksanaan Program Terpadu Pendidikan, dituangkan dalam Surat Nomor: 01/PB/VII/1985, tanggal 5 Januari 1985. Ketika Shaleh diangkat sebagai Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran, usia PTP Persatuan Ummat Islam telah menginjak tahun keempat. Namun konsep renovasi PTP masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, melalui forum Mu'tamar PUI ke-8 Shaleh mengajak segenap jama'ah Persatuan Ummat Islam untuk dapat merumuskan ulang program PTP. Dalam rumusan Shaleh, PTP Persatuan Ummat Islam adalah upaya renovasi (pembaharuan) pelaksanaan pola pendidikan Persatuan Ummat Islam, dengan melibatkan kegiatan seluruh Majelis Kepengurusan Persatuan Ummat Islam (seluruh kegiatan Persatuan Ummat Islam yang dilaksanakan melalui program Majelis-Majelis secara terpadu) diarahkan untuk tercapainya tujuan

pendidikan Persatuan Ummat Islam. Dengan demikian, melalui masing-masing kegiatannya setiap Majelis turut serta melahirkan produk (hasil) pendidikan yang kualitasnya diharapkan dapat memenuhi idealisme amaliyah Persatuan Ummat Islam. Majelis-Majelis pun pada gilirannya akan memperoleh motivasi kegiatan yang terarah, yang pada waktunya akan memperoleh pewaris segar yang berkualitas untuk kelangsungan kegiatan-kegiatannya. Menurut Shaleh, makna keterpaduan dalam "Program Terpadu Pendidikan" Persatuan Ummat Islam ini, karenanya, mencakup seluruh aspek amaliyah perhimpunan, baik aspek-aspek idiil maupun aspek-aspek kegiatan dan lingkungannya. Secara rinci, lanjut Shaleh, aspek-aspek amaliyah PUI tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pertama, Aspek-aspek *Idil*: Dasar, dan Tujuan Amaliyah, Doktrin Amaliyah dan Sejarah Persatuan Ummat Islam. Kedua, Aspek-aspek Kegiatan: Strategi Dasar Amaliyah (*Ishlahus Samaniyah-Delapan Ishlah*), Organisasi dan Kegiatannya. Ketiga, Aspek-aspek Lingkungan: masyarakat dengan berbagai segi permasalahannya, termasuk kondisi-kondisi alam sekitarnya (Shaleh, 1989: 1).

- <sup>14</sup> Tujuan penyelenggaraan MAPK adalah menyiapkan siswa untuk dapat mengikuti saringan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, terutama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (*Da'watul 'Amal*, 1991: 8).
- <sup>15</sup> Lima Kabupaten/Kota terpilih untuk menyelenggarakan MAPK tahap pertama adalah MA Jember (Jatim), MA Yogyakarta, MA (Ciamis), MA Padang Panjang (Sumatera Barat), dan MA Ujungpandang (Sulawesi Selatan) (*Da'watul 'Amal*, 1991: 8). MA Ciamis dimaksud adalah MA Darussalam dipimpin oleh salah seorang kader Persatuan Ummat Islam, Irfan Hielmy. Ia termasuk Pimpinan Pengurus Daerah PUI Kabupaten Ciamis dan anggota Dewan Pembina Pengurus Wilayah Persatuan Ummat Islam Jawa Barat.
- <sup>16</sup> Di antara isi Surat Edaran itu, Departemen Agama menetapkan penggunaan metodologi belajar mengajar dengan sistim tradisional pondok pesantren, yaitu pengasramaan siswa (pondok) dan bimbingan individual / tutorial (*sorogan*) oleh tutor (*Da'watul 'Amal*, 1991: 8).
- <sup>17</sup> Dari proyek Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), *Da'watul Amal* mencatat laporan mengenai langkah-langkah pelaksanaan proyek tersebut, meliputi: *Pertama*, rapat harian Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam pada 3 Mei 1991, diputuskan pelaksanaan MAPK-PUI

dimulai tahun ajaran 1991/1992 di Bobos Cirebon, sekaligus menunjuk O. Machmud sebagai Ketua Tim (Pembina) MAPK tersebut dengan tugas pokok melakukan langkah-langkah persiapan. *Kedua*, Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam mengeluarkan surat kepada Pengurus Daerah Cirebon Nomor: A-175/PB-Sek/V/91, tanggal 6 Mei 1991 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan MAPK-PUI. *Ketiga*, pada 17 Mei 1991 dilakukan rapat gabungan antara Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam, Pengurus Daerah Cirebon, dan pengurus Al-Islah di Bobos, tentang penjelasan MAPK-PUI dan pembentukan Pengurus BPPK. Di antara utusan Pengurus Besar yang hadir adalah O. Machmud, Dimy Dimiyati, Asy'ari, dan Shaleh. *Keempat*, Pengurus Besar/MPP mengeluarkan beberapa Surat Keputusan, yaitu: Nomor: 1/PB-a/SK/91 tanggal 18 Mei 1991 tentang Pengurus BPPK MAPK-PUI Bobos; Nomor: 2/PB-a/SK/91, tanggal 28 Mei 1991 tentang Tim Pembina MAPK-PUI; Nomor: 3/PB-a/SK/91, tanggal 13 Juni 1991 tentang Pengangkatan Ketenagaan pada MAPK-PUI Bobos. *Kelima*, surat Pengurus Besar/MPP kepada Kanwil Depag Jawa Barat Nomor: B-182/PB-a/VI/91, tanggal 13 Juni 1991 tentang Permohonan Rekomendasi Izin MAPK-PUI dilampiri Usulan Penyelenggaraan (proposal) MAPK-PUI. *Keenam*, pada 16 Juni 1991 dilaksanakan rapat BPPK di Bobos, dihadiri utusan dari Pengurus Besar Persatuan Ummat Islam M.U. Zainuddin Kori (Wakil Ketua Tim Pembina MAPK), Hasyim A.F. (Anggota Tim Pembina), Syatori Moengin (Wakil Sekjen I) dan Shaleh. Rapat membahas persyaratan dan langkah-langkah persiapan (jadwal). *Ketujuh*, penyerahan surat Nomor: B-182/PB-a/VI/91, tanggal 13 Juni 1991, dilampiri proposal MAPK-PUI kepada Kanwil Depag Jawa Barat melalui Kepala Seksi MA/MAPK, Cholidin pada 17 Juni 1991. *Kedelapan*, surat Pengurus Besar/MPP kepada Kandepag Cirebon Nomor: B-183/PB-a/VI/1991, tanggal 17 Juni 1991 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan MAPK-PUI di Bobos. *Kesembilan*, surat Pengurus Besar/MPP kepada Pimpinan Daerah PUI Ciamis, Nomor: A-188/PB-a/VI/1991 tanggal 21 Juni 1991 tentang Koordinasi Pendaftaran Calon Siswa MAPK lulusan seleksi MAPK Darussalam kepada Pimpinan MAPK Darussalam; Nomor: B-189/PB-a/VI/91, tanggal 21 Juni 1991 tentang pelimpahan calon siswa hasil seleksi MAPK Darussalam kepada Pimpinan Daerah PUI Cirebon/BPPK MAPK-PUI Bobos; dan Nomor: A-190/PB-a/VI/91, tanggal 21 Juni 1991 tentang penampungan calon siswa hasil seleksi MAPK Darussalam. *Kesepuluh*, pada 2 uli 1991 dilakukan kunjungan Pengurus

Besar Persatuan Ummat Islam (Hasyim A.F. dan Shaleh) bersama Pengurus Daerah Ciamis kepada MAPK Darussalam Ciamis (Irfan Hielmy) tentang bantuan/kerjasama Darussalam berupa penyerahan dokumen pendaftaran calon siswa (peserta seleksi) MAPK Darussalam sebanyak 280 orang (*Da'watul 'Amal*, 1991: 31-32).

<sup>18</sup> Di Jawa Barat, sebagai basis pendidikan Persatuan Ummat Islam dari 1952-2005 terdapat 1.474 madrasah/sekolah terdiri dari 1.382 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah (MD), 70 SMP/MTs., 20 SMA/MA/SMK, 2 Perguruan Tinggi, dan beberapa pesantren. Namun, tidak semua madrasah/sekolah itu menyandang nama Persatuan Ummat Islam, bahkan kurikulumnya pun berbeda-beda. Menurut Djahari, paling tidak terdapat empat kelompok madrasah/sekolah Persatuan Ummat Islam. Pertama, madrasah/sekolah yang masih menggunakan nama Persatuan Ummat Islam, muatan local Persatuan Ummat Islam, dan guru-guru maupun Kepala Sekolahnya dari jama'ah Persatuan Ummat Islam. Kedua, madrasah/sekolah dengan nama yayasan dan Persatuan Ummat Islam yang digandengkan. Misalnya, Madrasah Ibtidaiyah al-Ikhlas Persatuan Ummat Islam. Namun lambang Persatuan Ummat Islam tidak digunakan, hanya *Intisab* masih dibaca dan dipelajari. Ketiga, madrasah/sekolah yang dikelola yayasan dengan tidak lagi mencantumkan nama Persatuan Ummat Islam, sehingga tidak memakai lambang Persatuan Ummat Islam dan tidak membaca *Intisab* Persatuan Ummat Islam. Keempat, madrasah/sekolah Persatuan Ummat Islam yang dinegerikan oleh pemerintah (PW PUI Jabar, 2006: 5; *HU Pikiran Rakyat*, 2006: 5).

<sup>19</sup> Dikatakan gagal, meskipun Persatuan Ummat Islam telah berupaya maksimal dalam tahapan-tahapan penyelenggaraannya dengan melakukan sejumlah pertemuan, rapat, dan studi banding, namun tidak sebanding dengan jumlah calon siswa (peserta seleksi) ke MAPK-PUI Bobos. Berbeda dengan jumlah calon siswa (peserta seleksi) ke MAPK Darussalam Ciamis yang mencapai 280 orang. Jumlah calon siswa (peserta seleksi) ke MAPK-PUI Bobos hanya 15 orang (*Da'watul 'Amal*, 1991: 32).

<sup>20</sup> Dalam rencana Shaleh, program Terpadu Pendidikan Persatuan Ummat Islam Tahap II, 1994-1999 adalah: *Pertama*, menyempurnakan usaha-usaha inventarisasi dan pengolahannya, termasuk kegiatan-kegiatan musyawarah, loka karya, seminar dan *halaqah*. Kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan-kegiatan

pelatihan dan proyek-proyek” (Shaleh, 1989: 10).

- <sup>21</sup> Dalam Garis-garis Besar Program Pendidikan ke “PUI” an, disebutkan bahwa kurikulum Ke-PUI-an adalah kumpulan bahan kajian atau materi pembelajaran yang memberikan konsep yang jelas terhadap para anak didik sebagai kader penerus untuk menerima dan membawa misi perjuangan Persatuan Ummat Islam dalam menegakkan aqidah dan syari'at Islam secara kaffah, memahami perbedaan di kalangan umat dan dapat berperilaku tasamuh serta turut berusaha merealisasikan cita-cita organisasi demi terwujudnya Baldatun Thayibatun wa Rabbun Ghafur. Pendidikan Ke-PUI-an bertujuan meningkatkan kesadaran hidup sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT., berakhlak mulia, serta turut aktif dalam pengembangan misi perhimpunan, sehingga terwujud masyarakat Islami dan siap tampil sebagai pemimpin umat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Adapun bahan pelajaran Ke-PUI-an meliputi: sejarah perhimpunan, sejarah tokoh pendahulu, *intisab, ishlahus tsamaniyah*, ketentuan-ketentuan perhimpunan, ormas-ormas lain, dan *firqah-firqah* di luar Islam (PP PUI, 2008: 1-2).
- <sup>22</sup> Disebutkan, bahwa program Madjlis Perekonomian yang mendesak waktu itu adalah: pertama, menanam kesadaran dan kecerdasan berekonomi di kalangan para anggota. Kedua, berusaha untuk mewujudkan suatu usaha yang hasilnya untuk membiayai organisasi. Ketiga, member bimbingan dalam cara pertanian, perindustrian, perdagangan, dan perburuhan menurut ajaran dan hokum Islam (PB PUI, 1954: 74-75).
- <sup>23</sup> Tujuan dilaksanakannya Mukernas Majlis Perekonomian adalah untuk menyatukan sikap dan pandangan peserta tentang perlunya penjabaran lebih lanjut dan realisasi dari beberapa program Madjlis Perekonomian yang berkaitan dengan sumber dana ummat, kewirausahaan, dan dana penunjang untuk kegiatan organisasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada Mukernas adalah: Pertama, Terbentuknya Induk Koperasi pada tingkat Pengurus Besar, Pusat Koperasi pada tingkat Pengurus Wilayah dan Daerah, serta Koperasi Primer pada Pengurus Cabang dan Madjlis Taklim. Kedua, Ditemukannya pola baru untuk menggairahkan kewirausahaan ummat dan upaya mencari dana, terutama untuk modal dasar berdirinya koperasi (Wanta, 2007<sup>b</sup>: 1926).

- <sup>24</sup> Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga mandiri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kegiatan peningkatan gerakan moral melalui aktivitas pendidikan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pemberdayaan dan pengembangan program LM3 adalah usaha agribisnis. Program LM3 mulai digalakkan pada 2006 oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia dengan fokus pada peningkatan kemampuan, kapasitas, dan wawasan sumber daya manusia pengelola melalui pelatihan, magang, sekolah lapang, studi banding, dan pendampingan. Sebagai program strategis, dari 2006-2008 jumlah LM3 yang mendapat penguatan modal mencapai 3.065 lembaga, termasuk beberapa lembaga dari Persatuan Ummat Islam (*Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, Vol. 31, No. 5, 2009: 17).
- <sup>25</sup> Pada saat hampir bersamaan pemerintah Hindia Belanda mendirikan Madjelis Islam A'la Indonesia berdiri pada 21 September 1937. Madjelis Islam A'la Indonesia merupakan federasi organisasi sosial Islam se-Indonesia. Para tokoh gerakan Islam Madjelis Islam A'la Indonesia di antaranya: Mas Mansur dan Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), Wahab Hasbullah (Nahdhatul Ulama), Wondoamiseno (Sarekat Islam), dan Abdul Halim (Perserikatan Oemat Islam) (Notosusanto, 1984: 24).
- <sup>26</sup> Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) didirikan di Jakarta pada Februari 1968 dan dipimpin oleh Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun (dari Muhammadiyah). Pada Kongres Parmusi ke-I yang diselenggarakan pada 4-7 November 1968, sebetulnya peserta Kongres memilih Mohammad Roem sebagai Ketua Umum. Namun, karena pemerintah Orde Baru saat itu tidak merestui kepemimpinannya dengan alasan Roem merupakan tokoh Partai Masyumi, kepemimpinan partai ketika itu dikembalikan kepada Djarnawi Hadikusumo. Pada 17 Oktober 1970, Jaelani Naro mengklaim sebagai pemimpin Parmusi sehingga terjadi dualisme kepemimpinan di partai itu. Pemerintah Orde Baru ikut campur membenahi kisruh internal partai itu dengan mengangkat S. Mintaredja sebagai pemimpin Parmusi pada 20 November 1970. Menjelang Pemilu 1971, pemerintahan menggabungkan Parmusi bersama Partai Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Indonesia, Partai Syarikat Islam, menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tepatnya pada 5 Januari 1971 (*Portal Resmi PNRI*, 2013. "Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)" dalam [http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/en/election/directory/political\\_party/?box=detail&id=125&](http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/en/election/directory/political_party/?box=detail&id=125&)



from\_box=list&hlm=4&search\_ruas=&search\_keyword=&activation\_status=. Diakses tanggal 20 September 2013, pukul 06.55 WIB.

<sup>27</sup> Kesepuluh kontestan partai dimaksud masing-masing: Partai Nasional Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Murba, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Nadhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Sekretariat Bersama Golkar, dan Perti. Tiga partai yang mendapat dukungan rakyat secara signifikan pada pemilu 1955, yaitu Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia tidak lagi ikut pemilu 1971 disebabkan telah dibubarkan. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, dibubarkan oleh Soekarno, sedangkan Partai Komunis Indonesia dibubarkan oleh Soeharto (Notosusanto, 1984: 519; Sarwono, 2010: 1).

<sup>28</sup> Letnan Jenderal (Purn.) Ali Moertopo (Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924 – 15 Mei 1984) adalah seorang tokoh intelijen dan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan III (1978–1983) serta Deputy Kepala (1969–1974) dan Wakil Kepala (1974–1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara. Pada masa Orde Baru, Ali Moertopo melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia aktif dalam operasi-operasi intelejen dengan nama Operasi Khusus (Opsus). Operasi-operasi intelejen terutama ditujukan untuk menghancurkan lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1968, Ali menggabungkan partai-partai politik yang saat itu sangat banyak jumlahnya hingga menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1973, semua partai digabungkan menjadi dua partai politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan penggabungan partai-partai berbasis Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan penggabungan partai-partai berbasis nasionalis, serta Golongan Karya (*Portal Resmi PNRI*, 2013. “Biografi Pejabat Menteri Letnan Jenderal (Purn.) Ali Moertopo”, dalam [http://kepuustakaan.presiden-pnri.go.id/cabinet\\_personnel/popup\\_profil\\_pejabat.php?id=591&presiden\\_id=2&presiden=suh](http://kepuustakaan.presiden-pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=591&presiden_id=2&presiden=suh). Diakses tanggal 19 September 2013, pukul 11.21 WIB).

<sup>29</sup> Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>30</sup> Terdapat enam tuntutan yang disuarakan mahasiswa kepada

pemerintah selama kampanye reformasi, yaitu: **pertama**, tentang amandemen terhadap UUD 1945. Tuntutan para mahasiswa di antaranya: (a) pembatasan masa jabatan Presiden paling lama dua periode, (b) perluasan dan penegasan perlindungan HAM, (c) peninjauan keuangan dan sistem anggaran negara dengan memfungsikan BPK hingga ke daerah-daerah, (d) penegasan fungsi lembaga-lembaga tinggi negara dan pemisahan kekuasaan secara tegas, dan (e) diberlakukannya proses pemilihan Presiden RI secara langsung. **Kedua**, tentang penghapusan Dwi Fungsi ABRI/TNI, yaitu: (a) penghapusan keberadaan wakil TNI di lembaga legislatif, (b) penghapusan keberadaan fungsi sosial politik yang dirumuskan dalam ketentuan aturan yang kuat dan mengikat, (c) pemisahan peran antara TNI dan Polri, meliputi: kekhayatan ABRI, penghapusan fungsi pembinaan teritorial TNI, dan penghapusan bisnis militer. **Ketiga**, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan tuntutan reformasi, MPR RI mengeluarkan ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. **Keempat**, pembudayaan demokrasi, yang ditandai oleh belangsungnya kehidupan demokrasi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. **Kelima**, penegakan hukum dan supremasi hukum. Hal ini dapat dilihat dari: (a) -kemandirian kekuasaan kehakiman, (b) dibersihkannya lembaga peradilan dari KKN, (c) diaktifkannya *judicial review* atau uji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945, (d) pengadilan terhadap Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya, dan (e) pembatasan wewenang Mahkamah Militer. **Keenam**, otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan indikatornya antara lain: (a) pemberdayaan dan kemandirian DPRD dalam proses pemilihan ketuanya, (b) proses pemilihan kepala daerah secara langsung, (c) pembagian pendapatan antara pusat dan daerah, dan (d) pelaksanaan otonomi daerah sampai pada tingkat Kabupaten dan Kota (Fatwa, 2007: 1-13).

<sup>31</sup> Tuntutan mundur kepada Soeharto dikumandangkan di mana-mana. Soeharto akhirnya *legowo* untuk *lengser* oleh gerakan mahasiswa. Hal itu kemudian berimbas pada Golongan Karya. Karena Soeharto ketika itu menjabat sebagai Penasehat Partai, Golkar pun dituntut untuk dibubarkan. Pada saat itu, Golkar dicaci-maki di mana-mana. Selanjutnya, Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum di era ini. Ia kemudian berjuang mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemim-

pinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tidak sia-sia. Ia dipandang berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra. Hal itulah yang membuat Akbar menjadi Ketua Umum partai Golkar cukup legendaris (*Portal Resmi Partai Golkar*, 2013. "Sejarah Partai Golongan Karya" dalam <http://partaigolkar.or.id/golkar/sejarah-partai-golongan-karya/>. Diakses tanggal 20 September 2013, pukul 14.57 WIB.).

<sup>32</sup> Partai Ummat Islam (PUI) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1998 dengan Ketua Umum Deliar Noer dan Sekretaris Umum Fahmi Rahman. Partai Ummat Islam berbeda dengan organisasi massa Persatuan Ummat Islam (PUI). Keduanya tidak memiliki hubungan historis dengan para tokoh dan kader yang berbeda pula. Menurut Deliar Noer, pendirian Partai Umat Islam didasari dua pertimbangan, yaitu aspek ajaran dan historis. Dari sisi ajaran, agama Islam yang tidak memisahkan antara kehidupan agama dalam arti sempit dengan kehidupan bermasyarakat, seperti: politik, ekonomi, dan sosial. Dari sisi historis, umat Islam di Indonesia merupakan pelopor dalam mendirikan partai-partai politik. Seperti, Budi Utomo masih bersifat nasionalisme Jawa, kehadiran Partai Serikat Islam 1912 tujuannya antara lain nasionalisme di Indonesia. Partai Umat Islam sama sekali tidak bermaksud mendirikan sebuah negara Islam. Partai ini memandang pengalaman membuktikan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW dapat berdampingan dengan umat dan bangsa lain secara damai dengan menggunakan hukum masing-masing, yaitu Piagam Madinah (Kompas. 1999. "Partai Umat Islam" dalam [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian\\_Elections/Indopemilu-99/6-pui.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indopemilu-99/6-pui.htm). Diakses, tanggal 3 April 2014 pukul 02: 44 WIB.).

<sup>33</sup> PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Setelah segalanya dapat diselesaikan, Partai Keadilan kemudian menggunakan nama baru PKS (Partai Keadilan Sejahtera) (*Portal Resmi DPP PKS*. 2010. <http://www.pk-sejahtera.org>.

Diakses tanggal 15 April 2010 pukul 23.15 WIB.).

- <sup>34</sup> Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dengan Notaris Aswendi Kamuli, SH. Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, Irsan Tandjung, Sutan Bhatogana, Rusli Ramli dan R.F. Saragih. Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia (*Portal Resmi DPP Demokrat*. 2010. <http://www.demokrat.or.id/page/5/Sejarah>. Diakses tanggal 20 Mei 2010, pukul 20.05 WIB.).
- <sup>35</sup> Dalam Laporan Pertanggungjawaban PP PUI periode 2004-2009, disebutkan sebagai berikut:
- “Konsolidasi dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu: peremajaan kepengurusan organisasi, revitalisasi dinamika organisasi dan membangun loyalitas organisasi. Peremajaan Pengurus perlu kita lakukan mengingat kepengurusan yang ada waktu itu di tingkat daerah dan wilayah banyak yang sudah melewati masa baktinya. Bahkan ada yang sudah menjadi ketua pengurus selama tigapuluhan tahun. Revitalisasi dinamika organisasi dilakukan dengan mengaktifkan kembali pengurus menjadi sel-sel aktif organisasi yang dicirikan dengan adanya rapat dan kegiatan rutin. Revitalisasi merupakan upaya yang tidak mudah, mengingat lingkup area organisasi yang luas. Adakalanya, peremajaan berhasil kita lakukan tapi vitalitas organisasi masih juga belum tumbuh. Hal ini kita rasakan di beberapa daerah kabupaten yang luas, daerah yang sulit transportasi dan sedikitnya sumber daya manusia. Dan kesulitan terbesar yang kita hadapi adalah membangun loyalitas organisasi” (PP PUI, 2009: 15).
- <sup>36</sup> Beberapa penyempurnaan organisasi massa Islam PUI tertuang dalam Peraturan Pimpinan Pusat PUI Nomor: 002/Peraturan/PP/VI/2006 Tentang Pedoman Umum Standarisasi Organisasi.
- <sup>37</sup> Hal tersebut secara berulang diungkapkan Ahmad Heryawan, Nazar Haris, Nurhasan Zaidi, Djadja Djahari, atau Iding Bahrudin dalam setiap kesempatan kunjungan kerja ke Daerah. Sebut saja, misalnya di Sumedang (19 Oktober 2007), Majalengka (20 Oktober 2007), Cirebon

(20 Oktober 2007, dan Kuningan (20 Oktober 2007).

<sup>38</sup> Dalam lampiran III, Tokoh-Tokoh Masyumi dalam Kabinet Republik Indonesia, disebutkan, pertama: Kabinet Syahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946): Menteri Penerangan (Mohammad Natsir), dan Menteri Agama (M. Rasjidi). Kedua, Kabinet Syahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946): Menteri Muda Pertahanan (Arudji Kartawinata), Menteri Penerangan (Mohammad Natsir), Menteri Muda Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara), Menteri Agama (M. Rasjidi). Ketiga, Kabinet Syahrir III (2 Oktober 1946-3 Juli 1947): Menteri Dalam Negeri (Mohammad Roem), Menteri Muda Pertahanan (Harsono Cokroaminoto), Menteri Penerangan (Mohammad Natsir), Menteri Muda Penerangan (A.R. Baswedan), Menteri Muda Kemakmuran (Jusuf Wibisono), Menteri Muda Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara), Menteri Agama (Fathurrachman), Menteri Negara (A. Wachid Hasjim). Keempat, Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948): Wakil Perdana Menteri (Sjamsuddin), Menteri Dalam Negeri (Mohammad Roem), Menteri Muda Kehakiman (Kasman Singodimedjo), Menteri Negara (Anwar Tjokroaminoto). Kelima, Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1949): Menteri Dalam Negeri (Soekiman), Menteri Penerangan (Mohammad Natsir), Menteri Kemakmuran (Sjafruddin Prawiranegara), Menteri Agama (Masjkur). Keenam, Kabinet Sjafruddin (PDRI, 19 Desember 1948-13 Juli 1949): Ketua merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Urusan Luar Negeri (Sjafruddin Prawiranegara), Menteri Agama (M. Rasjidi). Ketujuh, Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949-20 Desember 1949): Wakil Perdana Menteri (Sjafruddin Prawiranegara), Menteri Penerangan (Sjamsuddin), Menteri Agama (Masjkur), Menteri Negara (Soekiman). Kedelapan, Kabinet Soesanto/Kabinet Peralihan (20 Desember 1949-21 Januari 1950): Menteri Penerangan (Sjamsuddin), Menteri Agama (Masjkur). Kesembilan, Kabinet Halim/Kabinet RI Yogyakarta (21 Januari 1950-6 September 1950): Wakil Perdana Menteri (Abdul Halim), Menteri Penerangan (Wiwoho Poerbohadidjojo), Menteri Agama (Faqih Usman). Kesepuluh, Kabinet Hatta III/Kabinet RIS (20 Desember 1949-6 September 1950): Menteri Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara), Menteri Penerangan, Pendidikan, dan Kebudayaan (Abu Hanifah), Menteri Agama (A. Wachid Hasjim), Menteri Negara (Mohammad Roem). Kesebelas, Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951):

Perdana Menteri (Muhammad Natsir), Menteri Luar Negeri (Mohammad Roem), Menteri Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara), Menteri Agama (A. Wachid Hasjim). Keduabelas, Kabinet Soekiman (27 April 1951-3 April 1952): Perdana Menteri (Soekiman), Menteri Luar Negeri (Achmad Soebardjo), Menteri Keuangan (Jusuf Wibisono), Menteri Sosial (dr. Sjamsuddin). Ketigabelas, Kabinet Wilopo (3 April 1952-1 Agustus 1953): Wakil Perdana Menteri (Prawoto Mangkoesasmito), Menteri Dalam Negeri (Mohammad Roem), Menteri Pertanian (Mohammad Sardjan), Menteri Agama (Faqih Usman). Keempatbelas, Kabinet Boerhanoeddin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956): Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan (Boerhanoeddin Harahap), Menteri Pertanian (Mohammad Sardjan), Menteri Kehakiman (Moeljatno), Menteri Perhubungan (Suchjar Tedjasoekmana), Menteri Pekerjaan Umum (Mohammad Noor) (Dzulfikriddin, 2010: 205-208).

<sup>39</sup> Sebutan "Islam politik" dipinjam dari Nasiwan untuk menyebut perjuangan Islam di bidang politik. Persepsi politik Islam dalam Islam politik bersifat ideologis, yaitu dipengaruhi oleh garis panduan politik yang lebih bersifat simbolik-ideologis Islam. Pada awalnya, kelompok Islam politik adalah Masyumi, NU, PSII, dan Perti (Nasiwan, 2003: 3).

<sup>40</sup> Pembubaran Partai Masyumi bermula dari perbedaan pendapat dalam menanggapi demokrasi terpimpin yang digulirkan Soekarno melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Perbedaan pendapat tersebut membawa nasib yang berbeda bagi Islam politik ketika itu. Secara garis besar pada saat itu Islam politik terbagi dua. Pertama, Masyumi memandang bahwa ikut serta dalam suatu sistim politik otoriter sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Kedua, bagi NU, PSII, dan Perti, turut serta dalam sistim Demokrasi Terpimpin adalah realistis dan pragmatik. Zuhri (NU) mengemukakan dalil "apa yang tidak dapat diraih 100 %, sebagian yang dapat diraih, jangan dilepaskan". Bagi Masyumi, masalahnya bukan pada untung 100 % atau kurang dari itu, tetapi Demokrasi Terpimpin akan membawa bencana bagi bangsa dan Negara. Karena itu, *move* Soekarno harus dilawan, apapun akibatnya. Suasana seperti itu segera dimanfaatkan oleh PKI dengan menyatakan berpihak sepenuhnya pada sistim Demokrasi Terpimpin yang digulirkan Soekarno. Tujuan utama PKI, kuat dugaan, adalah menghancurkan lawan-lawan politiknya, terutama Masyumi. Hal itu semakin diperkuat dengan jargon politik yang dikumandangkannya dengan sebutan "kepala

batu” bagi Masyumi. Jargon politik itu kemudian diamini Soekarno yang menilai Masyumi sebagai kekuatan “kepala batu” yang merintang penyelesaian revolusi di Indonesia. Melihat gelagat politik yang kurang semakin kurang menguntungkan partai Masyumi, sebelum pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960, yang berisi pembubaran partai Masyumi, beberapa anggota istimewa Masyumi segera menarik diri dari partai dan kembali ke organisasi induknya masing-masing. Persatuan Ummat Islam sebagai salah satu anggota istimewa Masyumi kemudian memilih menjadi organisasi kedaerahan yang lebih berkhidmat kepada pendidikan, dakwah, dan sosial (Ma'arif, 1986: 57-58; Sulastomo, 2008: 340).

<sup>41</sup> Pada pendirian Parmusi, Moehammad Roem terpilih menjadi Ketua Umum partai tersebut. Namun, karena pemerintah kurang berkenan, dalam lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 1970 tanggal 20 November 1970 tentang Daftar Susunan Pimpinan Pusat Partai Muslimin Indonesia, bukan hanya nama Roem, tapi nama-nama tokoh-tokoh utama dari Islam politik tidak dicantumkan. Pada daftar susunan itu, meskipun disebutkan dua buah posisi untuk perwakilan dari Persatuan Ummat Islam, yaitu sebagai Sekretaris dan Anggota, nama-namanya tidak disebut (Sulastomo, 2008: 345-346).

<sup>42</sup> Setelah Persatuan Ummat Islam menyatakan diri hanya sebagai organisasi kedaerahan yang berkhidmat dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, serta ditolaknya para tokoh Islam politik untuk memimpin Partai Muslimin Indonesia, praktis kader dan jamaah Persatuan Ummat Islam tidak tampak dalam kancah politik Indonesia. Bahkan ketika kader dan jama'ah Persatuan Ummat Islam ada yang terserap dan menjadi tokoh penting di pemerintahan atau swasta, atribut Persatuan Ummat Islam, dengan alasan untuk kemaslahatan bersama, ditinggalkan mereka.

<sup>43</sup> Slogan, “*Islam, yes, partai Islam no!*” pertama kali disuarakan Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) pada Januari 1970. Cak Nur mencoba mengupayakan pemisahan yang tegas antara urusan kerohanian dengan masalah Negara dalam kerangka baru yang lebih liberal, pluralis, bahkan sekular. Melalui pernyataannya itu, Cak Nur mencoba melampaui sekat-sekat lama antara pemahaman tradisional dan modernis dengan membedakan nilai-nilai Islam yang transenden dengan yang imanen. Ia berusaha menggulirkan pemahaman baru tentang

kebebasan politik, spiritual, dan intelektual dengan *tasamuh* (toleransi). Melalui pemikirannya itu, ia menyatakan bahwa konsep Islam politik yang berujung pada konsep Negara Islam adalah distorsi proporsi hubungan antara Negara dan agama (Elson, 2008: 392-393).

<sup>44</sup> Istilah *anti Islamic* pertama kali dikemukakan Hefner (1993: 2-4) dalam tulisannya *Islam, State an Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class*. Istilah yang sama kemudian diikuti Santoso dalam *Asian Journal of Political Science*, 3 (1)/1995, hlm. 4, melalui tulisannya "Islam and Politics in Indonesia during the 1990s".

<sup>45</sup> Kelahiran ICMI berawal dari diskusi kecil pada Februari 1990 di Mesjid kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Sekelompok mahasiswa seperti: Erik Salman, Ali Mudakir, M. Zaenuri, Awang Surya, dan M. Iqbal, merasa prihatin dengan kondisi kaum Muslim seiring terjadinya polarisasi kepemimpinan di kalangan kaum Islam. Masing-masing kelompok ketika itu sibuk dengan kelompoknya sendiri, serta berjuang secara *parsial* sesuai dengan aliran dan profesi masing-masing. Kemudian para mahasiswa tersebut dengan diantar Imaduddin Abdurrahim, M. Dawam Rahardjo, dan Syafi'i Anwar menghadap Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Habibie dan meminta untuk memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional. Sebanyak 49 orang cendekiawan Muslim menyetujui pencalonan Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim tersebut. Pada 27 September 1990, dalam sebuah pertemuan di rumah Habibie, ia memberitahukan bahwa usulan sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim itu disetujui Presiden Soeharto. Ia juga mengusulkan agar wadah cendekiawan muslim itu diberi nama "Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia", disingkat ICMI. Pada 7 Desember 1990 merupakan lembaran baru dalam sejarah kaum Muslim Indonesia di era Orde Baru, secara resmi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang (*Portal Resmi ICMI*. 2011. "Sejarah Kelahiran ICMI" dalam <http://www.icmi.or.id/read/tentang-icmi/199/sejarah-kelahiran-icmi/>. Diakses tanggal 16 September 2013, pukul 02: 37 WIB.

<sup>46</sup> Kedelapan belas partai Islam dimaksud, masing-masing adalah: (1) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (PKMI), (2) Partai Ummat Islam, (3) Partai Kebangkitan Ummat (PKU), (4) Partai Masyumi Baru, (5), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), (6) Partai Abul Yatama (PAY), (7) Partai Amanat Nasional (PAN), (8) PSII 1905, (9) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, (10) Partai Bulan Bintang (PBB), (11) Partai



Keadilan (PK), (12) Partai Nahdlatul Ummat (PNU), (13) Partai Islam Demokrat (PID), (14) Partai Persatuan (PP), (15) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (16) Partai Daulat Rakyat (PDR), (17) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), (18) Partai Umat Islam Indonesia (PUMI) (*Portal Resmi KPU. 1999. "Pemilu 1999" dalam [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42). Diakses tanggal 16 September 2013, pukul 02: 45 WIB.*)

<sup>47</sup> Dijumpai, selain dari kedua partai di atas, partai lainnya yang menjadi pilihan kader dan simpatisan Persatuan Ummat Islam adalah Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan satu-dua orang ada yang menjadi fungsionaris di PDI-P (Kuningan dan Majalengka) (Wawancara dengan Ahmad Fathullah Basyuni, 66 tahun, wawancara pada Sabtu, 27 April 2013, di rumah Abdullah Yasin Basyuni Majalengka, pukul 09.15 WIB; Iding Bahrudin, 53 tahun, Ketua Umum DPW Persatuan Ummat Islam Jawa Barat periode 2011-2015, wawancara pada Rabu, 12 Juni 2013 di Sekretariat DPW PUI Jawa Barat Jl. Sandang I Cirengot Cinambo Kota Bandung, pukul 13.45 WIB).

<sup>48</sup> Dari hasil Pemilu 2004, nama-nama kader dan simpatisan Persatuan Ummat Islam yang menjadi anggota legislatif tingkat provinsi Jawa Barat, misalnya: H.A.F. Basyunie (Partai Golkar), Mamat Chushowie (Partai Bulan Bintang), dan Eka Hardiana (Partai Keadilan Sejahtera). Sementara di DKI Jakarta, Heryawan untuk kedua kalinya terpilih menjadi anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera dan menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sementara untuk kabupaten/kota, di antaranya: Halim Paletahan (Partai Golkar- Kota Cirebon), A. Basyir S.A. (Partai Bulan Bintang-Garut), E. Trenggana (Partai Bulan Bintang-Garut), Acep Deny (Partai Keadilan Sejahtera-Kota Tasikmalaya), U.K. Anwarudin (Partai Persatuan Pembangunan-Kabupaten Sukabumi), dan Nazar Haris (Partai Keadilan Sejahtera-Kota Bekasi) (Wawancara dengan A. Basyir S.A., dan Eka Hardiana, pada Sabtu, 29 Juni 2013 di Gedung P4TK IPA Jl. Diponegoro No. 12 Bandung, pukul 13.00-13.25 WIB).

<sup>49</sup> Pasangan Ahmad Heryawan - Yusuf Macan Effendi (Hade) ditetapkan sebagai pasangan terpilih, setelah meraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2008 dengan raihan 7.287.647 suara (40,03 persen). Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Penetapan KPU Jabar No.46/Kep-KPUJB/IV/2008. Pasangan ini kemudian

dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013 pada Jum'at, 13 Juni 2008 bertempat di Gedung Merdeka Jl. Asia-Afrika Kota Bandung dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ketua Dewan M. Ruslan. Acara pelantikan selain dihadiri sejumlah gubernur dan anggota DPRD dari provinsi di Jawa, Bali, dan Lampung, juga dihadiri Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Ginjar Kartasasmita, Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (Heru. 2008. "KPU Tetapkan Pasangan Hade Gubernur dan Wagub Terpilih Jabar" dalam <http://www.antaranews.com/berita/99949/kpu-tetapkan-pasangan-hade-gubernur-dan-wagub-terpilih-jabar>. Diakses tanggal 26 September 2013, pukul 16.24 WIB).

<sup>50</sup> Tim Sebelas dibentuk oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengisi kekosongan setelah dibubarkannya Lembaga Pemilihan Umum (LPU) hingga terbentuknya Komite Pemilihan Umum. Anggota Tim Sebelas terdiri dari: Adnan Buyung Nasution, Miriam Budiardjo, Ryaas Rasyid, Andi Mallarangeng, Nurcholish Madjid, Anas Urbaningrum, Rama Pratama, Kastorius Sinaga, Adi Andojo Sutjipto, Affan Gafar, dan Mulyana W. Kusumah. Bertindak sebagai Ketua Tim, ialah Nurcholish Madjid (Komunikasi Informasi Terbuka London, 1999. "Setelah UU Politik, Apa?" dalam <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/02/03/-0028.html>. Diakses, 22 Desember 2012, pukul 03.27 WIB).

<sup>51</sup> Di antara organisasi massa Islam yang menjadi inisiator berdirinya Partai Bulan Bintang, adalah: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Ummat Islam, Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Islam, KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafi'iyah, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Pada awal pendiriannya Ketua Umum Partai Bulan Bintang adalah Yusril Ihza

Mahendra (*Portal Resmi PBB*. 2008. "Sejarah Singkat Partai Bulan Bintang" dalam <http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/>. Diakses Diakses, 22 Desember 2012, pukul 03.09 WIB).

<sup>52</sup> Tim lima terdiri dari Ma'ruf Amin (*Rais Syuriah*/Koordinator Harian PBNU), Dawam Anwar (*Khatib 'Aam* PBNU), Said Aqil Siradj (*Wakil Khatib 'Aam* PBNU), Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Dalam rapat itu diputuskan Ma'ruf Amin sebagai Ketua tim. Tugas utama Tim Lima adalah menampung setiap aspirasi dan usulan warga Nahdliyin yang berkembang waktu itu (*Portal Resmi DPP PKB*. 2010. "Sejarah Pendirian" dalam <http://www.pkb.or.id/sejarah-pendirian>. Diakses, 22 Desember 2012, pukul 02.12 WIB).

<sup>53</sup> Terpilih sebagai Ketua Tim Asistensi adalah Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), dengan anggota masing-masing: Muhyiddin Arubusman, Fachri Thaha Ma'ruf, Abdul Aziz, A. Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tugas Tim Asistensi adalah membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU (*Portal Resmi DPP PKB*. 2010. "Sejarah Pendirian" dalam <http://www.pkb.or.id/sejarah-pendirian>. Diakses, 22 Desember 2012, pukul 02.12 WIB).

<sup>54</sup> Pada Pemilu 2004 terjadi beberapa perubahan penting melalui amandemen yang berkaitan dengan Pemilu. Pertama, dalam hal mekanisme pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Berdasarkan konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan Presiden-Wakil Presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme Pemilu. Kedua, dibentuknya lembaga baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara prinsip, konsep perwakilan yang ada di DPD, sesuai namanya, adalah wujud dari representasi ruang/daerah. Ide perwakilan ruang ini terbentuk untuk mengkompensasi kelemahan dalam perwakilan politik yang ada di DPR. Di dewan terjadi ketidakseimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Akibatnya, jumlah wakil yang ada di DPR lebih banyak berasal dari daerah Pulau Jawa dibandingkan wakil dari daerah luar Pulau Jawa. Dengan hadirnya DPD, ketidakseimbangan itu berusaha diatasi.

Ketiga, pola rekrutmen Kepala Daerah. Konstitusi mengamanatkan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme Pemilukada, sesuai tingkatannya (Provinsi/Kabupaten/Kota) (*Portal Resmi PNRI*. 2004. "Pemilihan Umum Tahun 2004" dalam [http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id-=28&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id-=28&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=). Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 13.45 WIB.).

<sup>55</sup> Nama-nama partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, sebagai berikut: (1) *Partai Hanura*, (2) *Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*, (3) *Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia*, (4) *Partai Peduli Rakyat Nasional*, (5) *Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)*, (6) *Partai Barisan Nasional*, (7) *Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*, (8) *Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, (9) *Partai Amanat Nasional (PAN)*, (10) *Partai Perjuangan Indonesia Baru*, (11) *Partai Kedaulatan*, (12) *Partai Persatuan Daerah*, (13) *Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*, (14) *Partai Pemuda Indonesia*, (15) *Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme*, (16) *Partai Demokrasi Pembaruan*, (17) *Partai Karya Perjuangan*, (18) *Partai Matahari Bangsa*, (19) *Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)*, (20) *Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)*, (21) *Partai Republik Nusantara*, (22) *Partai Pelopor*, (23) *Partai Golongan Karya (Partai Golkar)*, (24) *Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, (25) *Partai Damai Sejahtera (PDS)*, (26) *Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia*, (27) *Partai Bulan Bintang (PBB)*, (28) *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)*, (29) *Partai Bintang Reformasi (PBR)*, (30) *Partai Patriot*, (31) *Partai Demokrat*, (32) *Partai Kasih Demokrasi Indonesia*, (33) *Partai Indonesia Sejahtera*, dan (34) *Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Partai Lokal di Aceh yang ikut menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2009*: (35) *Partai Aceh*, (36) *Partai Aceh Aman Sejahtera*, (37) *Partai Bersatu Aceh*, (38) *Partai Daulat Aceh*, (39) *Partai Rakyat Aceh*, (40) *Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Karim*. 2008. "Parpol dalam Pemilu 2009" dalam <http://agkarim.staff.ugm.ac.id/2008/07/08/parpol-dalam-pemilu-2009/>. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 14.02 WIB.).

<sup>56</sup> Sementara itu, nama-nama partai yang lolos verifikasi ulang Komisi Pemilihan Umum adalah: (1) *Partai Merdeka*, (2) *Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia*, (3) *Partai Sarikat Indonesia*, (4) *Partai Buruh (Karim*. 2008. "Parpol dalam Pemilu 2009" dalam <http://agkarim.staff.ugm.ac.id/2008/07/08/parpol-dalam-pemilu-2009/>. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 14.02 WIB.).

- <sup>57</sup> Kompatibilitas merupakan kata benda (*noun*), yaitu keadaan penyesuaian diri (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 719).
- <sup>58</sup> Kompatibel merupakan kata *adjektiva*, yaitu kata yang menjelaskan nomina atau pronomina, yang berarti mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian, kesesuaian (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 719).
- <sup>59</sup> Perseteruan ideologi terjadi hampir di setiap partai Islam. Misalnya, pada Partai Bulan Bintang terjadi perseteruan antara Abdul Qodir Jailani dengan Yusril Ihza Mahendra. Pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), antara Yusuf Supendi (Pendiri Partai Keadilan) dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq dan Anis Matta. Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pertama, antara Abdurrahman Wahid dengan Chairul Anam. Perseteruan itu akhirnya kubu Chairul Anam yang terdiri dari: Abdullah Faqih, Abdulrachman Qudori, Idris Marzuki, Munawir, Mas Subadar, dan Idham Cholid mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada 21 November 2006. Perseteruan di internal Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pula antara Abdurrahman Wahid dengan Muhaimin Iskandar. Keduanya kemudian menggelar Musyawarah Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa (MLB PKB). Kubu Muhaimin menggelar MLB KPB di Ancol, sementara kubu Abdurrahman Wahid menyelenggarakan MLB PKB di Parung. Muncullah dualisme dalam Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu: PKB Ancol dan PKB Parung. Tidak cukup hingga di situ, pada tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) pun terjadi perseteruan. Kaum muda pentolan Muhammadiyah yang kurang terakomodir oleh Partai Amanat Nasional (PAN) mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB) pada 16 Desember 2006. Ketua Umum Partai Matahari Bangsa (PMB) adalah Imam Addaruqutni (Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), Sekretaris Jendral: Ahmad Rofik (Mantan Ketum IMM), dan Bendahara: Armyn Gultom.

# BAB V

## SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdirinya Persatuan Ummat Islam merupakan hasil fusi dari dua buah organisasi massa Islam yang didirikan oleh orang asli Jawa Barat. Kedua organisasi itu adalah Perikatan Ummat Islam (PUI) berpusat di Majalengka dengan “guru” utamanya Abdoel Halim dan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) berpusat di Sukabumi dengan “guru” utamanya Ahmad Sanoesi. Secara teologis, sosiologis, dan politis kehadiran Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia memiliki arti penting bagi kaum muslim di Indonesia. Keduanya dapat dikelompokkan sebagai kaum modernis.

Pemikiran dan aktivitas yang dilakukan Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia memiliki ciri-ciri: *Pertama*, ajaran Islam yang dikembangkan Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia mengacu pada upaya kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, pintu *ijtihad* masih terbuka dan menolak *taqlid*. Kedua, dalam *ijtihad* Perikatan

Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia memberi penghormatan pada pendapat bukan kepada orang. Sekalipun eksistensi kyai masih digunakan, namun tidak lagi dipandang *ma'sum*. Ketiga, pembicaraan tentang Islam dalam Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pesantren dan mesjid, tetapi meluas meliputi pendirian dan pengelolaan madrasah-madrasah, penerbitan buku, majalah, buletin, dan sejenisnya. Keempat, dalam hal pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia terbuka kepada ilmu pengetahuan yang berasal dari kaum *kafir*, asalkan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Kelima, gerakan yang diperjuangkan Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia dapat dipandang berhasil dalam menghambat keterasingan kalangan yang mendapat pendidikan Barat dari ajaran Islam. Keenam, perhatian awal Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia adalah agama, namun berangsur dengan ke ranah sosial dan politik. Al-Qur'an dan al-Hadis bukan hanya sumber agama, melainkan juga sumber cita pikiran politik dan sosial.

Kehadiran Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia dalam kurun 1911-1952 telah menunjukkan peranannya di masyarakat, bukan hanya sekedar dalam bidang pendidikan dan dakwah, tetapi ikut menentukan arah kebijakan bangsa dengan menempatkan kader dan pimpinannya menjadi anggota *Cuo Sangi In* yang kemudian diubah menjadi *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI). Setelah Indonesia Merdeka, kader dan pimpinan Perikatan Ummat Islam dan Persatuan

Ummat Islam Indonesia banyak yang menjadi anggota PETA, KNIP, KNID, dan ikut hijrah ke Yogyakarta sebagai konsekuensi dari Perjanjian Renville. Pada 5 April 1952, karena kesamaan sifat, tujuan, dan arah pergerakan, Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Ummat Islam Indonesia melakukan fusi menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI).

Persatuan Ummat Islam dipandang berhasil menghadirkan ide keagamaan yang menyangkut tata keimanan (akidah), ritual (ibadah), dan kewajiban-kewajiban syari'at Islam lainnya sebagai faktor penting dalam kehidupan. Falsafah dan program terpenting terangkum dalam *Intisab* dan *Ishlahus Samaniyah*. Dalam menjalankan semua itu, Persatuan Ummat Islam menekankan kepada jama'ahnya untuk tidak terlalu "fanatik" terhadap akidah tertentu dan memilih sikap *tasamuh* (toleran) selama tidak terjerat oleh tata keimanan yang sesat. Dalam 'ubudiah pun sama, Persatuan Ummat Islam tidak terlalu "ringkih" terhadap ritual keagamaan tertentu selama tidak terjerat oleh berbagai praktek keagamaan yang sesat sehingga tidak begitu dijumpai kader dan jama'ah yang mempersoalkan *khilafiyah* dan *furu'iyah*. Bagi Persatuan Ummat Islam ukurannya sudah jelas, yaitu selama tidak sesat dari pemahaman keagamaan *Ahl Sunnah wa al-Jama'ah*, keyakinan yang bersumber dari madzhab Islam manapun dapat diterima. Dengan berpegang kepada pemahaman keagamaan tersebut, pada perkembangannya sekarang dalam persoalan *firqah* dan *madzhab* jama'ah Persatuan Ummat Islam terdapat yang mirip dengan Nahdlatul 'Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Tarekat.

Sumbangan penting lainnya dari Persatuan Ummat Islam adalah peranannya dalam bidang politik. Salah seorang kader terbaiknya, yaitu Syamsuddin pernah diamanahi jabatan



sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948). Ia pun pernah diamanahi jabatan Menteri Penerangan pada Kabinet Soesanto/Kabinet Peralihan (20 Desember 1949-21 Januari 1950). Menjelang akhir hayatnya (1950), Syamsuddin juga diamanahi jabatan Duta Besar RI untuk Pakistan. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, kader dan struktur pimpinan Persatuan Ummat Islam lainnya, yaitu: Halim, Moh. Fadhil Dasoeki, dan E.Z. Muttaqin berhasil terpilih menjadi anggota konstituante dan parlemen melalui partai Masyumi. Namun peran politik Persatuan Ummat Islam terhenti seiring kuatnya arus pergumulan politik nasional, terutama dengan PNI dan PKI. Persatuan Ummat Islam memilih keluar dari anggota istimewa partai Masyumi beberapa bulan sebelum terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 Tanggal 17 Agustus 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi. Persatuan Ummat Islam kemudian menetapkan diri sebagai organisasi kedaerahan yang mengkhususkan amaliahnya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sejak saat itu secara politis, Persatuan Ummat Islam berada dalam bayang-bayang kecurigaan pemerintah. Akibatnya, kiprah kader dan pimpinan Persatuan Ummat Islam pada 1952-1991, banyak berada dalam kondisi "diam".

Peran penting yang dimainkan Persatuan Ummat Islam kembali terlihat ketika memasuki era reformasi. Pada Pemilihan Umum 1999, Ketua Umum Pemuda Persatuan Ummat Islam, Ahmad Heryawan terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan (PK). Ia dibantu Nazar Haris, Nurhasan Zaidi, Eka Hardiana, dan Wira Utama Nurdin dibawah bimbingan Abu Muslih (Yazid Busthami) banyak berkeliling ke

beberapa Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) untuk melakukan *zaulah* dan pekan *ukhuwah*. Pada Pemilu 2004, kesempatan kader dan pimpinan Persatuan Ummat Islam untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih terbuka. Pada Pemilu tersebut terdapat 4 (empat) orang kader dan pimpinan Persatuan Ummat Islam terutama dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat yang terserap menjadi anggota DPR-RI.

Perubahan aktivitas politik kader dan pimpinan Persatuan Ummat Islam terjadi setelah Ahmad Heryawan terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam pada Mukhtamar PUI ke-11 pada 2004. Ia melakukan perubahan, perbaikan, dan penyesuaian terhadap sistematika dan isi batang tubuh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tata pamong organisasi, lambang, bendera, dan atribut organisasi lainnya. Bahkan, ia dapat dipandang sebagai *inisiator* penggabungan dua program *ishlah*, yaitu *ishlahul mujtama'* dan *ishlahul ummah* menjadi *ishlahus siyazah*.

Dalam *ishlahus siyazah* (perbaikan politik) meskipun diakui kader dan pimpinan Persatuan Ummat Islam berada dalam multi partai, namun mereka lebih kurang sepeham dengan Persatuan Ummat Islam, yaitu jika ada salah seorang kadernya yang diusung partai lain untuk menjadi pemimpin publik, maka seluruh anggota dan simpatisan harus mendukungnya. Muncullah jargon politik, "PUI yes, partai no". Hasil upaya *masif* berbuah manis setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan salah seorang kader Persatuan Ummat Islam sebagai Gubernur Jawa Barat untuk masa bhakti 2008-2013 hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2008. Mulai saat itu, Persatuan Ummat Islam berhasil mengisi

“ruang kosong” yang sebelumnya pernah diisi oleh para pendahulu mereka. Pada Mukhtamar PUI ke-12 tahun 2009 di Jatinangor Sumedang, peserta Mukhtamar mengamanahkan kepada Ahmad Heryawan untuk menjadi Ketua Majelis Syuro Persatuan Ummat Islam periode 2009-2014 beserta sepuluh anggota Majelis Syuro lainnya.

## 5.2 Saran

Demikian Persatuan Ummat Islam (PUI): Latar-Belakang dan Perkembangannya (1911-2011). Selama periode tersebut signifikansi Persatuan Ummat Islam sebagai sebuah topik penelitian ilmiah tidak terletak pada organisasinya, karena mereka kecil dan belum kokoh. Juga tidak terletak pada kiprahnya dalam pentas politik nasional, karena aktivitasnya lebih bersifat *insidental* dan *marginal*. Hal yang sama dalam pendidikan agama, Persatuan Ummat Islam telah memberikan pengaruh kepada kaum Muslim Indonesia, meskipun masih kalah pengaruh dibanding organisasi-organisasi massa Islam yang lain. Signifikansi Persatuan Ummat Islam mirip dengan gerakan-gerakan yang ditampilkan organisasi massa Islam lainnya, karena memiliki kesamaan perhatian. Bahkan pada waktu yang sama Persatuan Ummat Islam menjadi istimewa, karena berhasil memberikan solusi bagi persoalan-persoalan keagamaan dan pendidikan, terutama di Jawa Barat.

Perlu dikemukakan, bahwa hasil studi dan simpulan yang merupakan generalisasi terbatas ini, belum menampilkan secara utuh tentang organisasi massa Persatuan Ummat Islam. Karena itu, sangat terbuka untuk penelitian lanjutan dengan ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang organisasi

Persatuan Ummat Islam dan mempertajam gambaran mengenai perkembangan Islam politik di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penulisan sejarah politik mikro di Indonesia.

# DAFTAR SUMBER

## I. Sumber Tulisan

### 1.1 Arsip/Dokumen

*Algemeen Secretaris* No. 43. Tanggal 18 Agustus 1937. ddo. Kiverson-Cipanas. ANRI.

*Al-Ittihadijatoel Islamijjah*, dalam Koleksi R.A. Kern No. 474. KITLV.

*Besluit* No. 32 tanggal 3 Juli 1934 salinan dalam Mailrapporten Geheim No. 801 X/34. ANRI.

DPP PUI. 2011. Peraturan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (PUI) Nomor: 003/Peraturan/DPP/XII/2011 tentang Pedoman Umum Standarisasi Organisasi, tanggal 07 Desember 2011.

*Geheim Missive Adviseur voor Inlandse Zaken* No. 1446/K-8, 11 October 1938. ANRI.

*Gouvernements Besluit*. No. 35. ddo. 19 Januari 1924. ANRI.

- Gouvernements Besluit*. No. 43. ddo. 21 Desember 1917. ANRI.
- Gunseikanbu. 2602/1942. *Pendaftaran Orang Indonesia jang Terkemoeka jang Ada di Djawa*, eks Arsip Gunseikanbu Cabang I, Pegangsaan Timur 36 Jakarta. Nomor A. 205 gol. III b. Nomor berkas A. 15. ANRI.
- . 2602/1942. *Pendaftaran Orang Indonesia jang Terkemoeka jang Ada di Djawa*, eks Arsip Gunseikanbu Cabang I, Pegangsaan Timur 36 Jakarta. Nomor S-283 gol. III b. Nomor berkas 547. ANRI.
- Keppres No. 200/1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), tanggal 17 Agustus 1960.
- Koleksi *Binnenlansche Bestuur* No. 5154. ANRI.
- Laporan Mantri Polisi-Reserse tanggal 20 Agustus 1935 salinan dalam *Mailrapporten* Geheim No. 935 geh/37. ANRI.
- Laporan Rahasia Mantri Polisi Sukabumi tanggal 20 Agustus 1935. Nota Rahasia dalam *Mailrapporten* Geheim No. 953 geh/37. ANRI.450
- Mailr.* Geheim. No. 1057 X/29. ANRI.
- Mailrapporten* Geheim No. 248 geh/39. ARA.
- Mailrapporten* Geheim No. 953 geh/37. ARA.
- Mailrapporten* No. 209/K-VIII dalam Geheim No. 801 X/34. ANRI.
- Mailrapporten* No. C.D.X 84/I/16 dalam Geheim No. 801 X/34. ANRI.
- Pemerintah RI. 1953.
- UU Pemilu tanggal 4 April 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta: LN 1953/29.

- Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, tanggal 31 Desember 1959.
- Peraturan KSAD No. Prt/Perperu/040/1959 tentang Larangan Mengadakan Kegiatan-kegiatan Politik, tanggal 3 Juni 1959.
- PP PUI. 2006. Peraturan Pimpinan Pusat PUI Nomor: 002/Peraturan/PP/VI/2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Organisasi, tanggal 5 Juni 2006.
- Proces Verbaal* Hadji Ahmad Sanoesi tanggal 7 Oktober 1919 dalam Koleksi R.A. Kern No. 278. KITLV.
- Proces Verbaal* Raden Hadji Moechtar tanggal 15 Oktober 1919 dalam Koleksi R.A. Kern No. 278. KITLV.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1925, No. 378. ANRI.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1928, No. 29. ANRI.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1929, No. 227. ANRI.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1930, No. 438. ANRI.
- Surat *Adviseur voor Inlandsche Zaken* kepada Proc. Gen tanggal tanggal 3 Mei 1937 No. 627/K-8 Rahasia dalam *Mailrapporten* Geheim No. 953 geh/37. ANRI.
- Surat Bupati Batavia kepada Residen Batavia, tanggal 12 Juni 1929, No. 234/Z.G. ANRI.
- Surat *De Adviseur voor Inlandsche Zaken* yang ditandatangani oleh Gobee, perihal "Ophepping interneering Hadji Achmad Sanoesi" (Batavia: 18 October 1933). ANRI.
- Surat *de Procureur Generaal* (Jaksa Agung), No. 2372/A.P No. 2372/A.P tanggal 12 Mei 1934. ANRI.

Surat *Directeur van Binnenlandsch Bestuur* No. C.D.x C4/1/15.  
ANRI.

Surat *Directeur van Justitie* (Direktur Kehakiman) No. X/10/5  
tanggal 25 Mei 1934, "Aanwijzing Soekaboemi als  
verblijfplaats van Hadji Achmad Sanoesi" *De Directeur  
van Justitie*, J.J. Schrieke (Batavia-Centrum: 25 Mei 1934).  
ANRI.

Surat Gubernur Jawa Barat kepada *Guoverneur Generaal*, tanggal  
10 Juli 1929, No. G 5 I/14/14. ANRI.

Surat Gubernur Jawa Barat No. G/51/6/7 tanggal 27 September  
1933 (dalam "*betreffende de de mogelijkheid tot opheffing der  
interneering van H. Achmad Sanoesi*" *De Gouverneur van  
West-Java*, Schnitsler (Batavia: 27 September 1933).  
ANRI.

Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 27 September 1933 No. G.  
5/6/7. Salinan dalam *Mailrapporten* Geheim No. 801  
X/34. ANRI.

Surat Hadji Ahmad Sanoesi dalam *Mailr* Geheim No. 1057 X/28.  
ANRI.

Surat Kepala Komisarisi Polisi kepada Residen Batavia, tanggal  
19 Juni 1929, No. 574/Geh. ANRI.

Surat Mantri Polisi-PID No. 22/Rahasia tanggal 21 Januari 1937  
salinan dalam *Mailrapporten* Geheim No. 953 geh/37.  
ANRI.

Surat Residen Batavia kepada Gubernur Jawa Barat, tanggal 5  
Juli 1929, No. 1144/F. *Geheim Eigenhandig*. ANRI.

Surat Residen Priangan tanggal 15 Desember 1927 No. 50/E,  
salinan dalam *Mailrapporten* Geheim No. 679 X/28.  
ANRI.



Surat tanggal 8 Agustus 1928 No. G 5 I/16/9 salinan dalam *Mailrapporten*. Geheim No. 1057X/29. ANRI.

*Uitrekkel uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie* No. 2 X, Batavia den 11den September 1928. ANRI.

UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 4 April 1953.

UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, tanggal 27 Agustus 1975.

UU No. 3 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, tanggal 19 Februari 1985.

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 17 Juni 1985.

*Verslag van het congres van de Perserikatan Oelama te Madjalengka van 29-31 Augustus 1931*. Batavia, 16 October 1931. ANRI.

*Verslag van het 13de congres van de "Persjarikatan Oelama" in September 1935 te Indramajoe*. Batavia, 23 September 1935. ANRI.

## 1.2 Buku

Abdulchalis. 1936. *Economie Dan Cooperatie Dalam Islam*. Majalengka: Santi Asromo.

-----, 1928. *Pedoman Propaganda Persatoean Islam*. Madjalengka: tp. KITLV.

-----, 1932. *Padoman Persjarikatan Oelama*. Majalengka: Hoofdbestuur Persjarikatan Oelama Indonesia. KITLV.

- Aboebakar. 1957. *Sedjarah Hidup H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Peringatan K.H.A. Wahid Hasjim.
- Adnan, Basit. 1982. *Kemelut di NU : antara Kyai dan Politisi*. Solo: Mayasari.
- Akim. Moh. 1964. *Kiai H. Abdul Halim Penggerak PUI*. Majalengka: Yayasan K.H. Abdul Halim.
- Al-Chadimi, Maulana Ali Said. Tt. *Bariqah Mahmudiyah*. Jilid I. Kairo: Tp.
- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Manufi, Syaikh Mahmud Abu al-Faidl. Tt. *Luma al-Yaqin*. Mesir: Tp.
- Al-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad al-Husni. Tt. *Ittihaf Sadatul Muttaqin*. Jilid II. Kairo: Tp.
- Ambary, Hasan Mu'arif. 2006. "Sejarah Perkembangan Persatuan Ummat Islam (PUI)" dalam *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat*. Darun Setiady (ed.). Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Anam, Chairul. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Duta Aksara Mulia.
- Anwar, Rosihan. 1971. *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kartika Tama.
- Atja. 1986. *Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Bandung: Bagian Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Atmakusumah & Sri Rumiati Atmakususmah. 1997. *Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya*. Seri I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- At-Tirmidzi. Tt. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arabi.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Bahar, Saafroedin *et al.* 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Setneg RI.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam pada Masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bisri, Cik Hasan *et al.* 2005. *Pergumulan Islam dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda*. Bandung: Kaki Langit.
- Budiardjo, Miriam (ed.). 1984. *Aneka Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Busthami, U. Yazid. 1991. "Ringkasan Faham Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah" dalam *ASWAJA (Ahlu Sunnah wal Jama'ah)*. S. Wanta. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- Yazid. 2006. "Faham Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah" dalam *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat*. Darun Setiady (ed.). Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Corteseo, Armando. 1944. *The Summa Oriental of Tome Pires; an Account of the East*. Jilid XXXIX dan XL. London: Hakluyt Society.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa-Kritik*. Jakarta: Rajawali Press.

- Daud, Abu. Tt. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar el-Fikr.
- De Graaf, H.J. & Th. G. Th. Pigeaud. 1985. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Terjemahan. Jakarta: Grafiti Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Dewan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Dienaputra, Reiza D. 2006. *Sejarah Lisan Konsep dan Metode*. Bandung: Minor Books.
- Djajadiningrat, P. A. A. 1936. *Kenang-Kenangan P.A.A. Djajadiningrat*. Djokja: Kolfbuning.
- DPP PUI. 2010<sup>a</sup>. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ummat Islam*. Jakarta: DPP PUI.
- DPP PUI. 2010<sup>b</sup>. *Persatuan Ummat Islam (PUI)*. Jakarta: DPP PUI.
- DPP PUI. 2010<sup>c</sup>. *Rencana Strategis dan Program Amal Persatuan Ummat Islam (PUI) Masa Bakti Tahun 1431-1436 H./2010-2015 M*. Jakarta: DPP PUI.
- DPP PUI. 2010<sup>d</sup>. *Rencana Strategis dan Program Amal Persatuan Ummat Islam (PUI) Masa Bhakti 1431-1436 H./2010-2015*. Jakarta: DPP PUI.
- DPP PUI. 2011. *Logo dan Aset-Aset Persatuan Ummat Islam*. Jakarta: Sekretariat DPP PUI.
- DPP PUI. Tt. *Profil Persatuan Ummat Islam*. Jakarta: DPP PUI.
- Drewes, G.W.J. 1955. "Indonesia: Mysticism and Activism" dalam Gustav E von Grunebaum. *Unity and Variety in Muslim Civilization*. Cichago: University of Chicago. Hlm. 287-290.

- Dzulfikriddin, M. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Elson, R. E. 2008. *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Terjemahan Zia Anshor. Jakarta: Serambi.
- End, Th. Van den. 1986. *Sumber-sumber Zanding tentang Sejarah Gereja di Jawa Barat 1858-1963*. Seri Sumber-sumber Sejarah Gereja di Indonesia No. 3. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fadlullah, Cholid. 1994. *Tri Sila Hasta Wahana dalam Intisab Persatuan Ummat Islam*. Jakarta: Panitia Muktamar IX PUI.
- Falah, Miftahul. 2009. *Riwayat Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi*. MSI Cabang Jawa Barat kerjasama dengan Pemerintah Kota Sukabumi, Bandung. Faridl, Miftah. 2006.
- “Merekonstruksi Gerakan Dakwah PUI” dalam *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat*. Darun Setiady (ed.). Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Faure, Edgar *et al.* 1980. *Belajar untuk Hidup: Dunia Pendidikan Hari Ini dan Hari Esok*. Edisi I. Terjemahan Bhratara Aksara. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Federspiel, Howard M. 1970. *Persatuan Islam Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca: Cornell University.
- Garaghan, Gilbert J. 1946. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Geertz, Clifford. 1982. *Islam yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*. Terjemahan Hasan Basri. Jakarta: YIIS.

- Gellner, Ernest. 1984. *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Gunseikanbu. 2604/1944. *Orang Indonesia Jang terkemoeka di Djawa*. Ttp.: Gunseikanbu.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Hadikusuma, Djarnawi. Tt. *Dari Jamal al-Din al-Afghani sampai K.H.A. Dahlan*. Yogyakarta: Persatuan.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halim, Abdul (ed.). 1934. *Ketetapan Pengajaran di Sekolah Ibtidaiyah (Rendah) POI-POMP*. Majalengka: Tp.
- , 1938. *Risalah Penoendjoek Bagi Sekalian Manoesia*. Tasikmalaja: Galunggung Drukerij.
- Hall, Daniel George Edward. 1955. *A History of Southeast Asia*. London: Micmillan.
- Hanafi, A. 1992. *Pengantar Theology Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Hasjmy, A. 1981. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hassan, A. 1985. *Soal-Djawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: Diponogoro.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembang Pesantren dan Masyarakat (P3M).

- Hurgronje, Cristiaan Snouck. 1931. *Mekka in The Nineteenth Century*. Trans. J.H. Monahan. London: Luzac. KITLV.
- Husein, 'Abd Allah ibn. Tt. *Ibraz al-Muntada fi Hurmat Kitabat Lafdz al-Qur'an bi Khat al-Hulanda*. Batavia Centrum: Mathba'at al-Sayid Usman.
- IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 1988. *Kenang-kenangan 20 Tahun IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 1968-1988: IAIN dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ida, Laode. 1996. *Anatomi Konflik: NU, Elit Islam, dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indonesia. Arsip Nasional. 1976. *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 8. Jakarta: ANRI.
- Indonesia. Arsip Nasional. 1980. *Memori Serah Jabatan 1931-1940 (Jawa Barat)*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 11. Jakarta: ANRI.
- Indonesia. Arsip Nasional. 1988. *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*. Penerbitan Sejarah Lisan No. 4. Jakarta: ANRI.
- Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan. 2008. *Profil Penerima Tanda Kehormatan Gelar Pahlawan Nasional, Bintang Mahaputera dan Bintang Budaya Parama Dharma dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November*. Jakarta: Sekjend DTK.
- Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan. 2009. *Profil Penerima Tanda Kehormatan Gelar Pahlawan Nasional, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa dan Bintang Budaya Parama Dharma dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November*. Jakarta: Sekjend DTK.

- Iskandar, Muhammad. 1993. *Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi*. Jakarta: PBPUI.
- , 2001. *Para Pengemban Amanah Pergulatan Kyai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Ismail, Nur Mahmudi. 1998. "Jati Diri Partai Keadilan" dalam *Memilih Partai Islam Visi, Misi, dan Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jackson, Karl D. 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Terjemahan Pustaka Utama Grafiti. Jakarta: Grafiti.
- Jurdi, Syarifuddin et al. 2010. *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.). 1976. *Sarekat Islam Lokal*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 7. Jakarta: ANRI.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- , 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kazi, A.K dan Flynn, J.G. 1984. *Muslim Sects and Divisions: The Section on Muslim Sects in Kitab al-Milal wan-Nihal*. London: Kegan Paul International.
- Komite Tashaluh. 2010. *Rekonsiliasi dan Reformasi Politik NU (PKB Ancol, PKB Parung, dan PKNU)*. Ttp.: Komite Tashaluh.
- Lubis, Nina H. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.



- . 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- . *et al.* 2009. *Sejarah Calon Pahlawan Nasional K.H. Ahmad Sanusi Berdasarkan Buku-buku dan Kesaksian Dalam Rangka Pengusulannya sebagai Pahlawan Nasional*. Bandung: Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat Bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Sunda Fakultas Sastra Unpad.
- . *et al.* 2011. *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*. Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- . *et al.* 2011. *Sejarah Provinsi Jawa Barat*. Jilid 2. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1985. *Islam dan Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- . 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- . 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 1986. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Suna Kalijaga Press.
- Mahfoedz, Maksoem. 1982. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: yayasan Kesejahteraan Ummat.
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga.
- Martha, Ahmaddani G. 1985. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Esa.

- Mas'ud, Jibrán. 1963. *Al-Raid Mu'jam Lughawi 'Ashriyi*. Beirut: Dar Al-'Ilm al-Malayin.
- Meilink-Rulofsz, M.A.P. 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*. Martinus Nijhoff: The Hague.
- Misrawi, Zuhairi *et al.* 2010. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rohmatan Lil-'Alamin*. Bandung: Pustaka Oasis.
- Mudjiman, Haris. 1994. *Wajib Belajar di Indonesia: Anak Usia 7-12 Tahun*. Ttp.: Sebelas Maret University Press.
- Muhsin Z., Mumuh. 1994. *Kota Bogor: Studi tentang Perkembangan Ekologi Kota (abad ke-19 sampai Abad ke-20)*. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.
- MUI Jabar. 2005. *MUI dalam Dinamika Sejarah (BMAU ke MUI di Jawa Barat)*. Bandung: MUI Provinsi Jawa Barat.
- Mulianto, Sindu *et al.* 2006. *Panduan Lengkap Supervisi Diperkaya Perspektif Syari'ah*. Jakarta: Gramedia.
- Muslih, Abu. 1991. "Ahlu sunnah Wal-Jama'ah menurut Persatuan Ummat Islam" dalam *ASWAJA (Ahlu Sunnah wal Jama'ah)*. S. Wanta. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- , 2006. "Ahlu Sunnah Wal Jama'ah menurut Persatuan Ummat Islam" dalam *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat*. Darun Setiady (ed.). Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Nasiwan. 2003. *Diskursus antara Islam dan Negara Suatu Kajian tentang Islam Politik di Indonesia*. Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat.

- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1986. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars.
- Noeh, Zaini Ahmad. 1980. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- , 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- , 1995. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- , et al. 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: AlvaBet.
- Nordholt, Henk Schulte & Gerry van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Terj. Bernard Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV-Jakarta.
- PB PUI. 1954. *Anggaran Dasar Persatuan Ummat Islam*. Majalengka: PB PUI.
- PB PUI. 1954. *Keputusan Mu'tamar "Persatuan Ummat Islam" (P.U.I.) Ke-II*. Sukabumi: PB. PUI.
- PB PUI. 1977. *Naskah Kumpulan Bahan Penataran*. Majalengka: PB PUI MPP.
- PB NU. 1984. *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: PBNU.

- Peacock, Jamel L. 1986. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Jakarta: Cipta Kreatif.
- PN Balai Pustaka. 1976. *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- PP Persis. 1991. *Qanun Asasi/ Qanun Dakhili Persis*. Bandung: PP Persis.
- PP PUI. 2006. *Kurikulum SMP/MTs.: Garis-Garis Besar Program Pendidikan Ke "PUI" an*. Jakarta: PP PUI.
- PP PUI. 2008. *56 Tahun Peringatan Hari Fusi Persatuan Ummat Islam: 5 April 1952-2008*. Jakarta: DPP PUI.
- PP PUI. 2009. *Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum PP PUI Periode 2004-2009*. Jakarta: PP PUI.
- PP PUI. 2010. *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ummat Islam (PUI)*. Jakarta: PP PUI.
- PW PUI Jabar. 2006. *Laporan Amal Pimpinan Wilayah Persatuan Ummat Islam Jawa Barat periode 2000-2005*. Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Rahardjo, M. Dawan. 1985. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Renier, G.J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Terjemahan A. Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridjaluddin, F.N. & Anang Rohwiyono. 2008. *Bunga Rampai Pendidikan Islam*. Jakarta: Pusat Kajian Islam Universitas Muhammadiyah Hamka.

Rosidi, Ajip *et al.* 2000. *Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya Cirebon dan Banten*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sanoesi, Ahmad. 1347 H. *Silah al-Basil fi al-Dharb 'Ala Tazahiq al-Bathil*. Sayid Yahya ibn Usman. Tanah Abang.

----- . 1930. *Tahdzirul Awam min Muftarayati Cahaya Islam*. Betawi: Sayyid Yahya bin Usman.

----- . 1934. *Al-Isyarat fi al-farq bain al-Shadaqat wa al-Dhiyafat*. Poncol Tanah Tinggi Batavia Centrum: Percetakan al-Ittihad.

----- . 1934. *Al-Isyarat fi al-Farq bain al-Shadaqat wa al-Dhiyafat*. Poncol Tanah Tinggi Batavia Centrum: Al-Ittihad.

----- . 1942. *Al-Shilah al-Mahiyat li Thuruqal-Firaq al-Mubtadi'at*. Sukabumi: Tp.

----- . Tt. *Misbah al-Falah fi Aurad al-Masa' wa al-Shabah*. Ttp.: Tp.

----- . Tt. *Qawanin al-Diniyyat wa al-Dunyawiiyyat fi Umur al-Zakat wa al-Fithrah*. Tp. Sukabumi.

----- . Tt. *Siraj al-Adzkiya fi Tarjamat al-Adzkiya*. Sukabumi: Tp.

----- . Tt. *Tauhid Al-Muslimin wa 'Aqa'id al-Mu'minin*. Sukabumi: Tp.

Sanusi, A. Zarkasyi. 1954. "Materi Chutbah dalam Rapat Umum Mu'tamar PUI ke-II, tanggal 30/31 Agust. '54 di Sukabumi" dalam *Tafsir Azas Persatuan Ummat Islam*. Majalengka: PB PUI.

Setiady, A. Darun (ed.). 2006. *Revitalisasi Peran PUI Dalam Pemberdayaan Ummat*. Bandung: Pimpinan Wilayah Persatuan Ummat Islam (PUI) Jawa Barat.

- Shaleh, Anwar. 1966. *Sejarah Perjuangan Pemuda Persatuan Ummat Islam (PPUI)*. Bandung: Tp.
- , 1989. *Program Terpadu Pendidikan PUI Aktualisasinya dengan Pendekatan Aspek-Aspek Amaliyah PUI Menuju Kemandirian Pendidikan*. Jakarta: Panitia Pusat Mukhtamar VIII Persatuan Ummat Islam.
- Shaleh, Munandi. 2011. *K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional*. Bekasi: Grafika Offset.
- Simanungkalit, N. 2008. *Teknik Vokal Paduan Suara*. Jakarta: Gramedia.
- Sipahoetar, A.M. 1946. *Siapa? Lukisan tentang Pemimpin*. Soekaboemi: Pertjetakan "Pemerintah". KITLV.
- Sirozi, Muhammad. 2004. *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: AK Group.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Terjemahan S. Aji. Yogyakarta: Ombak.
- Soedjono, Toerip Imam et al. 2001. *Atlas Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia & Dunia*. Jakarta: Titik Terang.
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid I cet. IV. Jakarta: Panitia Penerbit.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Steenbrink, Karel A. 1995. *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1942*, Mizan, Bandung.
- Stoddard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam*. Terjemahan Panitia Penerbit. Jakarta: Panitia Penerbit.

- Sudjana, Ohan. 1984. *Liku-Liku Perjuangan Syarikat Islam*. Jakarta: DPP Partai Syarikat Islam Indonesia 1905/PSII 1905.
- Sukarsa, Dartum. 2007. *Potret K.H. Abdul Halim dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat (1887-1962)*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
- Sulasman. 2007. *K.H. Ahmad sanusi 1889-1950 Berjuang dari Pesantren ke Parlemen*. Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Sulastomo. 2008. *Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru Sebuah Memoar*. Jakarta: Kompas.
- Taufiqullah, O. 1991. "PUI dan Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah" dalam S. Wanta. *ASWAJA (Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah)*. Buku Seri V. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- , 2006. "PUI dan Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah" dalam A. Darun Setiady (ed.). *Revitalisasi Peran PUI Dalam Perberdayaan Ummat*. Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Tim Penerbit Balai Pustaka. 1976. *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjandrasasmita, Uka (ed.). 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Turner, Jonathan H. 1978. *The Structure of Sociological Theory*. Illionis: The Dorsey Press.
- van Carbee, P. Baron Melvil dan W.F. Versteeg 1853 - 1862. *Algemeen Atlas van Nederlandsch Indie*. Batavia: van Haren Norman & Koff.
- Van der Kroef, Justus M. 1954. *Indonesia in the Modern World*. Bandung: Masa Baru. KITLV.

- Wanta, S. 1987. *35 Tahun Persatuan Ummat Islam (PUI) dalam Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan*. Majalengka: Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah PBPUI.
- . 1987. *Atribut dan Identitas PUI*. Majalengka: PB PUI-MPP.
- . 1990. *Intisab "PUI" (Persatuan Ummat Islam) Lahir Penjelasan dan Penerapannya*. Majalengka: PB PUI Majelis Pendidikan, Penerangan dan Dakwah.
- . 1991<sup>a</sup>. *Lambang-Mars-Hymne-Intisab Persatuan Ummat Islam*. Seri I. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- . 1991<sup>b</sup>. *Badan Hukum, Anggaran Dasar, ART "PUI"*. Seri II. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- . 1991<sup>c</sup>. *Tafsir Asas Persatuan Ummat Islam*. Seri III. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- . 1991<sup>d</sup>. *Tujuan dan Pola Dasar Pendidikan PUI*. Seri IV. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- . 1991<sup>e</sup>. *ASWAJA (Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah)*. Seri V. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Dakwah.
- . 1991<sup>f</sup>. *KH Abdul Halim dan Pergerakannya*. Seri VI. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran Penerangan dan Dakwah.
- . 1991<sup>g</sup>. *KH Ahmad Sanusi dan Perjoangannya*. Seri VII. Majalengka: PB PUI Majelis Penyiaran Penerangan dan Dakwah.



- , 2007<sup>a</sup>. *Persatuan Ummat Islam Pergerakan Aliran Modern Bidang Studi Ke-PUI-an*. Seri VIII. Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- , 2007<sup>b</sup>. *Persatuan Ummat Islam: Pergerakan Aliran Modern*. Buku Seri VIII A (revisi). Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- , 2007<sup>c</sup>. *Al-Mawa'izh: Metode Hidup dan Kendalanya*. Buku Seri ke-30. Jakarta: Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam.
- Weir, Hans. 1976. *A Dictionary of Modern Writen Arabic*. New York: Ithaca.
- Wildan, Dadan. 1995. *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*. Bandung: Gema Syahida.
- Yunus, Mahmud. 1960. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zaidi, Nurhasan, et al. 2009. *Risalah Intisab Persatuan Ummat Islam (PUI)*. Jakarta: Panitia Seabad PUI.

### **1.3 Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Artikel/Entri dalam Surat Kabar, Majalah, dan Makalah**

- A-71. 2006. "Sekolah & Madrasah PUI Perlu Diselamatkan". *Pikiran Rakyat*, 24 September 2006: 5.
- Anonim. 1930. *Pembela Islam*, No. 5/Februari 1930: 5.
- Anonim. 1931. *Al-Hidajatoel Islamijjah*, No. 1. Th. I. Maret 1931: 1; 9.
- Anonim. 1932. *Al-Hidajatoel Islamijjah*, No. 6. Th. II. Agustus 1932: 3-6.
- Anonim. 1931. *Soeara Persjarikatan Oelama*, No. 10. Th. III. October 1931: 96-97.

- Anonim. 1940. *Attabligoel Islami*, No. 8. Th. III. Agustus 1940: 3-4.
- Anonim. 1941. *Attabligoel Islami*, No. 9. Th. IV. September 1941: 7.
- Anonim. 1945. "Undang-Undang Dasar". *Berita Repoeblrik Indonesia*, No. 1 Tahun I, 17 November 1945: 3.
- Anonim. 1991. "Ishlahus Samaniyah". *Da'watul 'Amal*, No. 24. Safar 1412 H/ Agustus 1991: 23.
- Berg, C.C. 1950. "The Islamization of Java". *Studia Islamica*, IV. 1950: 111-142.
- Darmawan, Dadang. 2009. *Ortodoksi Tafsir: Respons Ulama terhadap Tafsir Tamsijjatoel-Moeslimien karya K.H. Ahmad Sanusi*. Disertasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Dienaputra, Reiza D. 2010. *Mengenal Perjuangan KH Abdullah Bin Nuh (30 Juni 1905-26 Oktober 1987)*. Makalah untuk Pengusulan Pahlawan Nasional.
- Djuwaeni, Ahmad. 1990. *Pengetahuan Mahasiswa terhadap Intisab dalam Hubungannya dengan Kesadaran Berorganisasi di Lingkungan Perguruan Tinggi PUI Suatu Kajian Empiris*. Tesis. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- TtArti dan Makna Intisab*. Makalah. Jakarta: PB PUI.
- DPP PUI. 2011. *Peran PUI dalam Kemandirian Ekonomi Ummat Melalui Sistim Syari'ah*. Makalah. DPP PUI: Departemen Ekonomi.
- Fatwa, A. M. 2007. *Reformasi Nasional antara Harapan dan Kenyataan*. Makalah. Medan: Panitia Pelaksana Peringatan 9 Tahun Reformasi BEM se-Indonesia.
- Halim, Abdul. 1931. "Adab dan Cinta Kepada Rasul". *Soeara Persjarikatan Oelama*, No. 10 th. III, Oktober 1931: 86.

- , 1931. "Adab". *Soeara P.O.*, No. 11-12 th. III, Nopember-Desember 1931: 91.
- , 1932. "Al-Qur'an wa al-'Ulum al-Asriyyah". *Soeara Persjarikatan Oelama*, No. 5-6-7 th. IV, Mei-Juni-Juli, 1932<sup>a</sup>: 45.
- , 1932. "Al-Qur'an wa al-'Ulum al-Asriyyah". *Soeara Persjarikatan Oelama*, No. 8-9 th. IV, Agustus-September 1932<sup>b</sup>: 65-6.
- , 1935. "Iman Mendjadi Ujian". *As-Sjoero*. No. 2 th. VI/1935<sup>c</sup>: 147.
- , 1935. "Iman Menjadi Ukuran". *As-Sjoero*, No. 3-4 th VI/1935<sup>d</sup>: 160.
- , 1935. "Kaum Muslimin Harus Insaf!". *As-Sjoero*, No. 5 th. VI, 1935<sup>b</sup>: 176.
- , 1935. "Wetenschap dan Agama". *As-Sjoero*, No. 2/th. VI/1353 H.-1935<sup>a</sup>: 144.
- , 1936. "Prae-Detinatie Leer atau Taqdir". *As-Sjoero*, No. 1 th. ke-7. 1936: 4-5.
- , 2603. "Roeangan Hadis tentang Penoetoep para Nabi". *Soeara M.I.A.I.*, No. 2, th. I. 2603: 9.
- , 2603. "Tangga Kebahagiaan Oemoem". *Soeara M.I.A.I.*, No. 2. Th. I. 2603: 7.
- , 2604. "Masjaraat Hidoep dan Semangat Bekerdja". *Soeara Moeslimien Indonesia*, Majalah No. 2 Th. II. 2604: 5.
- , 2604. "Menoedjoe Kearah Perbaikan Peripergaolan Hidoep Manoesia Bersama dalam Doenia Allah". *Soeara Moelimien Indonesia*, No. 4. Th. 2. 2604: 12.

- , 2605. "Aafateol Idjtimaiah Kebinasaan Pergaoelan Manoesia Bersama". *Soeara Moeslimien Indonesia*, No. 15. Th. 3. 2605: 4-5.
- , 2605. "Oelama Pembawa Amanat Allah". *Soeara Moeslimien Indonesia*, No. 16. Th. 2. 2605: 8.
- , 1944. "Risalah Menudju ke Arah Perbaikan Peri Pergaulan Hidup Manusia Bersama Dalam Dunia Allah". *Soeara Muslimin Indonesia*, No. 4 th. 11/1363 H./1944: 12.
- , 1957. "Agama Pelita Masyarakat". *Hikmah*, No. 19. Th. X. 25 Mei 1957/25 Syawal 1376. 1957: 20.
- Hayat, Bahrul. 2009. "Pelajaran Apa pun harus Menggiring Anak untuk Bertauhid". *Intisabi*, No. 2 th. I/Syawal 1430/Oktobre 2009: 22.
- Herlina, Nina. 1997. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Hidajat, Abu Sjahid. 1967. "K.H. Abdul Halim Hidup dan Perjuangannya". *Panji Masyarakat*, No. 2 th. 2. 1967: 19-20.
- Hurgronje, Cristiaan Snouck. 1927. "Het Mohammedanisme". *Verspreide Geschriften*. Bonn and Leipzig: Kurt Schroeder 1923-1927, VI, ii, 1927: 219-220. KITLV.
- Iskandar, Muhammad. 1991. *Para Pengemban Amanah Kyai dan Ulama dalam Perubahan Sosial dan Politik di Priangan c.a. 1900-1942*. Tesis. Amsterdam: Vrije Universiteit. KITLV.
- Jalaluddin. 1990. *Santi Asromo K.H. Abdul Halim Studi tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Disertasi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Kahmad, Dadang. 1993. *Kajian tentang Pengambilan Keputusan untuk menjadi Pengikut Tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyah*;

*Studi Kasus di Kecamatan Ujungberung Bandung*. Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Kori, M.U. Zainuddin. 1990. *Intisab, Makna dan Aflikasinya*. Makalah. Jakarta: PBPUI.

Mawardi, Asep Mukhtar. 1985. *Haji Ahmad Sanusi: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Skripsi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

------. 2011. *Haji Ahmad Sanusi dan Kiprahnya dalam Pergolakan Pemikiran Keislaman dan Pergerakan Kebangsaan di Sukabumi 1888-1950*. Tesis. Semarang: Undip.

Muhsin, Mumuh. 2010. *Priangan Abad Ke-19 Dalam Arus Dinamika Sosial-Ekonomi*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Nurani, Rani Siti. 2005. *Kiprah K.H. Ahmad Sanusi dalam Organisasi Ittihadiyah di Sukabumi Tahun 1931-1945*. Skripsi. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Prawira, Suwandi Wigena. 1975. "K.H. Abdul Halim dan Santi Asromo". *Panji Masyarakat*, No. 177, th. XVI, 1975: 19-20.

Redaktur *Intisabi*. 2009. "Sikap Politik PUI Independen dan Memilih yang Baik". *Intisabi*, No. 01. Rabi'ul Tsani 1430 H./April 2009: 46.

Rifa'i, M.A. 1990. *Intisab Makna dan Aflikasinya*. Makalah. Jakarta: PBPUI.

Sanoesi, H.A. 2603. "Rintisan Boedi". *Soeara M.I.A.I*, No. 15. Th. 1. 2603: 3-4.

Shaleh, Anwar. 1989. *Program Terpadu Pendidikan PUI Aktualisasinya dengan Pendekatan Aspek-Aspek Amaliyah*

*PUI menuju Kemandirian Pendidikan*. Makalah. Jakarta: PB PUI.

Shaleh, Anwar. 1990. *Intisab Makna dan Aplikasinya*. Makalah. Jakarta: PB PUI.

Solehuddin. 1931. "Sjakib Arslan". *Soeara Persjarikatan Oelama*, No. 6-7-8, th. III, Juni 1931: 69.

Srono, A. Dj. K. 1932. "Sikap Moe'min" dalam *Soeara Persjarikatan Oelama*, No. 8-9, th. IV, Agustus-September 1932: 63.

Suaidi, E. Hamzah. 2008. *Re-Design Kurikulum Pendidikan PUI*. Makalah. Jakarta: PP PUI.

Indonesia. Departemen Pertanian. 2009. "Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian R.I", No. 5 Volume 31 Tahun 2009: 17.

Westra, See H. 1939. "Customs and Muslim Law the Netherlands East Indies". *Transactions of the Grotius Society*, No. XXV. 1939: 151-167. KITLV.

Wiratmadja. 1931. "Menentang Hidoepnja P.O.". *Soeara P.O.*, No. 11. Th. III. November 1931: 94.

Zakaria, Oyo. 1991. "Upaya Pengembangan Ekonomi Ummat". *Da'watul 'Amal*, No. 24. Safar 1412 H/Agustus 1991: 10-12.

Zuhdi, Susanto. 2010. *Menggagas Pengusulan K.H. Abdullah Bin Nuh Sebagai Calon Pahlawan Nasional*. Makalah untuk Pengusulan Pahlawan Nasional.

#### 1.4 Artikel dalam Internet

- Arifah, Ema Nur. 2008. "Deklarasi Pasangan Hade di Sabuga" dalam . Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 13.16 WIB.
- Attarvanrumy. 2009. "Mengenang Sang Wali Kutub Abuya Dimiyati" dalam <http://attarvanrumy.com/2009/11/mengenang-sang-wali-kutub-abuya-dim-yati-html>. Diakses tanggal 22 Januari 2010, pukul 02.11 WIB.
- Direktori Partai Politik Indonesia. 2009. "9 Partai Politik yang Lolos dari Parliamentary Threshold dan Perolehan Kursi dalam DPR Pemilu Legislatif 2009" dalam <http://partai.info/pemilu2009/>. Diakses tanggal 4 Oktober 2013, pukul 02.22 WIB.
- FokusJabar. com. 2012. "Mengenang Pilkada Jabar 2008: HADE Dulu Dilantik Bareng, Nanti Bertarung Sengit" dalam <http://www.google.co.id/imgres?-imgurl=http://fokusjabar.com/2012/11/08/mengenang-pilkada-jabar-2008-hade-dulu-dilantik-bareng-nanti-bertarung-sengit/>. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 13.21 WIB.
- Heru. 2008. "KPU Tetapkan Pasangan Hade Gubernur dan Wagub Terpilih Jabar" dalam <http://www.antaraneews.com/berita/-99949/kpu-tetapkan-pasangan-hade-gubernur-dan-wagub-terpilih-jabar>. Diakses tanggal 26 September 2013, pukul 16.24 WIB.
- Heryawan, Ahmad. 2013. "Profil H. Ahmad Heryawan" dalam <http://www.ahmadheryawan.-com/home/ahmad-heryawan/profil>. Diakses tanggal 27 September 2013, pukul 01.47 WIB.
- Karim, Abdul Gaffar. 2008. "Parpol dalam Pemilu 2009" dalam <http://agkarim.staff.ugm.-ac.id/2008/07/08/parpol->

dalam-pemilu-2009/. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 14.02 WIB.

Komunikasi Informasi Terbuka London, 1999. "Setelah UU Politik, Apa?" dalam . Diakses tanggal 22 Desember 2012, pukul 03.27 WIB).

Kompas. 1999. "Partai Umat Islam" dalam [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indone-sian\\_Elections/Indo-pemilu99/6pui.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indone-sian_Elections/Indo-pemilu99/6pui.htm). Diakses, tanggal 3 April 2014 pukul 02: 44 WIB.

Portal PNRI. 2004. "Pemilihan Umum Tahun 2004" dalam <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id>. Diakses tanggal 22 September 2013, pukul 13. 45 WIB.

Portal Resmi BKD Jawa Barat. 2012. "Sejarah Provinsi Jawa Barat" dalam <http://bkd.jabarprov.go.id/index.php-/subMenu/601>. Diakses tanggal 24 November 2012 pukul 03.40 WIB.

Portal Resmi DKI Jakarta. 2011. "Sejarah" dalam <http://www.jakarta.go.id-/web/news/1970-/01/Sejarah-Jakarta>. Diakses tanggal 1 Desember 2011, pukul 05.31 WIB.

Portal Resmi DKI Jakarta. 2013. "Maklumat 3 November 1945" dalam <http://www.jakarta.go.id/web-/encyclopedia/detail/1767/Maklumat-3-Nove-mber-1945>. Diakses tanggal 18 Juni 2013, pukul 13.15 WIB.

Portal Resmi DPP Demokrat. 2010. "Partai Demokrat" dalam <http://www.demokrat.or.id/page-/5/Sejarah>. Diakses tanggal 20 Mei 2010, pukul 22.10 WIB.

Portal Resmi DPP PKB. 1998. "Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa" dalam <http://www.pkb.or.-id/naskah-deklarasi>. Diakses tanggal 1 Oktober 2013, pukul 13.33 WIB.



- Portal Resmi DPP PKB. 2010. "Sejarah Pendirian" dalam <http://www.pkb.or.id/sejarah-pendirian>. Diakses tanggal 22 Desember 2012, pukul 02.12 WIB.
- Portal Resmi DPP PKS. 2010. "Selayang Pandang Partai Keadilan Sejahtera" dalam <http://www.pk-sejahtera.org>. Diakses tanggal 15 April 2010, pukul 16.39 WIB.
- Portal Resmi DPR RI. 2004. "Anggota 2004-2009" dalam <http://www.dpr.go.id/id/arsip/-anggota2004>. Diakses tanggal 26 September 2013, pukul 10.37 WIB.
- Portal Resmi ICMI. 2011. "Sejarah Kelahiran ICMI" dalam <http://www.icmi.-or.id/read/tentang-icmi/199/sejarah-kelahiran-icmi/>. Diakses tanggal 16 September 2013, pukul 02:37 WIB.
- Portal Resmi KPU Pusat. 1999: "Hasil Pemilu 1999" dalam [http://www.kpu.-go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.-go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42). Diakses tanggal 26 September 2013, pukul 10.27 WIB.
- Portal Resmi KPU Pusat. 2009. "Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2009" dalam [http://www.kpu.-go.id/dmdocuments/DAFTAR\\_ANGGOTA\\_DPR\\_2009.pdf](http://www.kpu.-go.id/dmdocuments/DAFTAR_ANGGOTA_DPR_2009.pdf). Diakses tanggal 26 September 2013, pukul 10.17 WIB.
- Portal Resmi KPU Pusat. 2010. "Partai Peserta Pemilu 1955" dalam [tp://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=39](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39). Diakses tanggal 15 Mei 2010 pukul 21.17 WIB.
- Portal Resmi KPU Pusat. 2010. "Pemilu 1999" dalam [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=-view&id=42](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=-view&id=42). Diakses tanggal 15 Mei 2010 pukul 21.32 WIB).

- Portal Resmi KPU Pusat. 2013. "Pemilu 1971" dalam [http://www.kpu.-go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40](http://www.kpu.-go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40). Diakses tanggal 23 Maret 2013, pukul 11.47 WIB.
- Portal Resmi KPU. 1999. "Pemilu 1999" dalam [http://www.kpu.go.id-/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.go.id-/index.php?option=com_content&task=view&id=42). Diakses tanggal 16 September 2013, pukul 02:45 WIB.
- Portal Resmi LSI. 2006. "Prospek Islam Politik di Indonesia" dalam <http://www.lsi.or.id/riset/-143/prospek-islam-politik-di-indone-sia>. Diakses tanggal 21 Mei 2011, pukul 03.16 WIB.
- Portal Resmi PBB. 2008. "Sejarah Singkat Partai Bulan Bintang" dalam <http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/>. Diakses tanggal 22 Desember 2012, pukul 03.09 WIB.
- Portal* Resmi PP PUI. 2010. "Ahmad Heryawan Jadi Ketua Majelis Syuro PUI" dalam . Diakses tanggal 23 Juni 2013, pukul 07.57 WIB.
- Portal Resmi PKS. 2011. "Sejarah Ringkas" dalam <http://www.pks.or.id/-content/sejarah-ringkas>. Diakses tanggal 22 Desember 2012, pukul 02.22 WIB.
- Portal Resmi Provinsi Jawa Barat. 2011. "Peta Provinsi Jawa Barat" dalam <http://www.jabarprov.go.id/jabar/files/-PETA%20JABAR.jpg>. Diakses tanggal 30 November 2011 pukul 03.11 WIB.
- Portal Resmi Partai Golkar. 2013. "Sejarah Partai Golongan Karya" dalam <http://partaigolkar.or.id-/golkar/sejarah-partai-golongan-karya/>. Diakses tanggal 20 September 2013, pukul 14.57 WIB.

- Portal Resmi PBB. 2013. "Sejarah Singkat PBB" dalam <http://bulan-bintang.org/partai/sejarah-singkat/>. Diakses tanggal 26 September 2013, pukul 11.47 WIB.
- Portal Resmi PNRI. 2013. "Biografi Pejabat Menteri Letnan Jenderal (Purn.) Ali Moertopo", dalam [http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinet\\_personnel/popup\\_profil\\_pejabat.php?id=591&presiden\\_id=2&presiden=suh](http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=591&presiden_id=2&presiden=suh). Diakses tanggal 19 September 2013, pukul 11.21 WIB.
- Portal Resmi PNRI. 2013. "Direktori Parpol Peserta Pemilu" dalam [http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/political\\_party/?box=list&hlm=5&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=](http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/political_party/?box=list&hlm=5&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=). Diakses tanggal 16 Juni 2013, pukul 05.25 WIB.
- Portal Resmi PNRI. 2013. "Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)" dalam [http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/en/election/directory/political\\_party/?box=detail&id=125&from\\_box=list&hlm=4&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=](http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/en/election/directory/political_party/?box=detail&id=125&from_box=list&hlm=4&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=). Diakses tanggal 20 September 2013, pukul 06.55 WIB.
- PR LM. 2009. "Menyongsong Seabad, PUI Pertegas Kiprah Organisasi" dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/104241>. Diakses tanggal 23 Juni 2013, pukul 08.01 WIB.
- Republika. 2009. "Ahmad Heryawan Jadi Ketua Majelis Syuro PUI" dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/09/12/28/98-330-ahmad-heryawan-jadi-ketua-mejelis-syuro-pui>. Diakses tanggal 23 Juni 2013, pukul 08.04 WIB.
- Sarwono. 2010. "Partai Golkar Dari Mana Mau Ke Mana" dalam <http://incoharper.multiply.com/journal/item/135>

/Partai-Golkar-Dari-Mana-Mau-Kemana. Diakses tanggal 20 Mei 2010, pukul 17.11 WIB.

Senjaya, Nurdin. 2009. "Menteri Agama Buka Acara Muktamar XII Persatuan Ummat Islam" dalam <http://tabloidbusertrans/2009/12/menteri-agama-buka-acara-mukta-mar-xii.html>. Diakses tanggal 23 Juni 2013, pukul 07.54 WIB.

## II. Sumber Lisan (Wawancara)

Ahmad Fathullah Basyuni (66 tahun) Mantan Camat Tambun, mantan Ketua BP7 Kabupaten Bekasi, dan mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golongan Karya (1999-2004). *Wawancara*. Majalengka, tanggal 27 April 2013.

Asep Suja'i bin Isak Farid (45 tahun) Pengasuh Pesantren Cintawana, Putra KH. Isak Farid. *Wawancara*. Tasikmalaya, tanggal 18 Januari 2010.

Djahari, Djadja (54 tahun) Mantan Ketua PW PUI Jawa Barat Periode 2001-2006 dan 2006-2011. *Wawancara*. Bandung, tanggal 11 Januari 2012.

Eded bin Ali Kholiluddin bin Toha (64 tahun) Guru Madrasah Aliyah Cintawana. *Wawancara*. Tasikmalaya, tanggal 18 Januari 2010.

Hardiana, Eka (47 tahun) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Keadilan Sejahtera, murid Maksum di Perguruan Persatuan Ummat Islam Bondongan. *Wawancara*. Bandung, tanggal 26 Juli 2010.

Soetari Adiwinata, Endang (68 tahun) Mantan Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Ketua Dewan Syariah Wilayah PUI Jawa Barat. *Wawancara*. Bandung, tanggal 7

Desember 2011.

Ganis, Ust. ( $\pm$  35 tahun) Pimpinan Harian Pesantren Daarussalam, cucu dan penerus KH. Yusuf Taujiri. *Wawancara*. Garut, 13 Januari 2010.

Lilis Halimah Yusuf Taujiri ( $\pm$  48 tahun) Puteri Yusuf Taujiri, Pengasuh Pesantren Al-Bayyinah. *Wawancara*. Garut, 14 Januari 2010.

Hasbullah (70 tahun) Murid *mama* Maksum di madrasah Al-Fu'ad. *Wawancara*. Bogor, 12 Juli 2010.

Iding Bahruddin (53 tahun) Ketua Umum DPW Persatuan Ummat Islam Jawa Barat. *Wawancara*. Bandung, 12 Juni 2013.

Nazar Haris (49 tahun) Sekretaris Majelis Syuro Persatuan Ummat Islam. *Wawancara*. Bandung, 29 Juni 2013.

Nurhasan Zaidi (47 tahun) Ketua Umum Harian DPP Persatuan Ummat Islam, Anggota DPR RI (2009-2014). *Wawancara*. Bandung, 29 Juni 2013.

### III. Sumber Benda

1. Foto-foto Nisan Para Guru Utama Persatuan Ummat Islam. Bandung: Koleksi Pribadi.
2. Foto-foto Lembaga Pendidikan dan Para Guru Utama Persatuan Ummat Islam. Bandung: Koleksi Pribadi.
3. Piagam dan Medali Bintang Mahaputera Utama untuk Abdul Halim dan Ahmad Sanoesi.
4. Piagam dan Medali Gelar Pahlawan Nasional untuk Abdul Halim.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Nisan, Bangunan Peninggalan, Piagam dan Medali Tokoh Persatuan Ummat Islam

**Foto 1 Nisan K H. Abdul Halim**



Sumber : Dokumentasi Wawan Hernawan, 30 Maret 2008

**Foto 2 Nisan K H. Abdul Halim**



Sumber : Dokumentasi Wawan Hernawan, 30 Maret 2008

Keterangan : Nisan K. H. Abdul Halim di Komplek Santi Asromo, Majalengka sebelum diangkat menjadi Pahlawan Nasional

Foto 3 Nisan K H. Ahmad Sanoesi (tampak depan)

1



Foto 4 Nisan K H. Ahmad Sanoesi (tampak samping)



Sumber : Dokumentasi Wawan Hernawan, 9 Februari 2013

Keterangan : Nisan K. H. Ahmad Sanoesi di Komplek Pemakaman Keluarga  
Belpast Gunung Puyuh Sukabumi



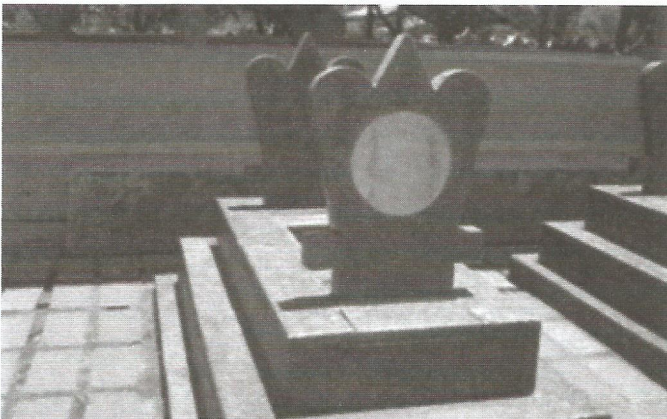
### Foto 5 Nisan K.H.A. Zarkasyie Sanusi



Sumber : Dokumentasi Wawan Hernawan, 9 Februari 2013

Keterangan : Nisan K.H. A. Zarkasyie Sanusi di di Komplek Pemakaman Keluarga Belpast Gunung Puyuh Sukabumi

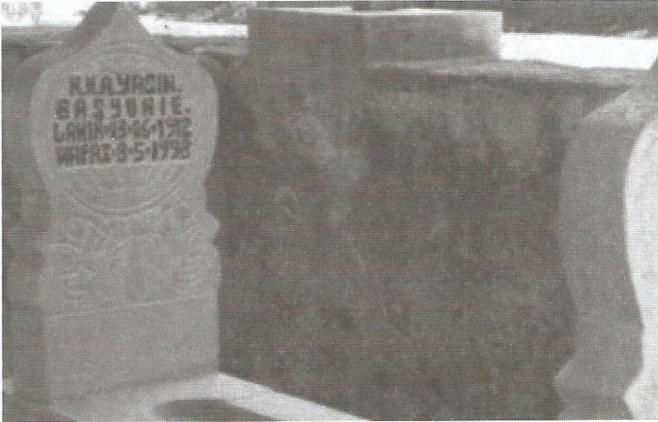
### Foto 6 Nisan K.H. Djoenaidi Mansoer



Sumber : Dokumentasi Wawan Hernawan, 14 Oktober 2013

Keterangan : Nisan K.H. Djoenaidi Mansoer di Komplek Pemakaman Keluarga Cijati Majalengka

**Foto 7 Nisan K.H. Abdullah Yasin Basyunie**



Sumber : Dokumentasi Wawan Hernawan, 14 Oktober 2013

Keterangan : Nisan K. H. Abdullah Yasin Basyunie di Komplek Pemakaman Keluarga Cijati Majalengka

**Foto 8 Nisan Prof. DR. H. Hasan Mu'arif Ambary**



Sumber : Dokumentasi Wawan Hernawan, 14 Oktober 2013

Keterangan : Nisan Prof. Dr. H. Hasan Mu'arif Ambary di Komplek Pemakaman Keluarga Cijati Majalengka

Foto 9 Medali Dari Pemerintah Republik Indonesia

**BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA**



**Keppres No. 042TK/TH. 2008  
Tanggal 6 November 2008**

**I. K.H. Abdul Halim (Alm)**

Sumber: Sekjen DTK., 2008: 11.

Keterangan: Dengan Keppres No. 041/TK/TH. 2008 tanggal 6 November 2008 Presiden Republik Indonesia Berkenan Menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Untuk K.H. Abdul Halim

Foto 10 Medali Dari Pemerintah Republik Indonesia

**BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA**



**1. K.H. AHMAD SANUSI (Alamarhum)**

Sumber: Sekjen DTK., 2009: 39.

Keterangan: Dengan Keppres No. 059/TK/TAHUN 2009 Tanggal 6 November 2009 Presiden Republik Indonesia Berkenan Menganugerahkan Gelar Bintang Mahaputera Adipradana untuk K. H. Ahmad Sanoesi

### Foto 11 Bangunan Santi Asromo



Sumber: Dokumentasi Wawan Hernawan, 30 Maret 2008

Keterangan: Komplek Balai Pamulangan Pondok Mufidat Santi Asromo  
Peninggalan K. H. Abdul Halim di Pasir Ayu Majalengka

### Foto 12 Mesjid Peninggalan K.H. Abdul Halim



Sumber: Dokumentasi Wawan Hernawan, 30 Maret 2008

Keterangan: Mesjid ini berada di Komplek Santi asromo, meskipun sudah direnovasi, namun masih dipertahankan bentuk aslinya.

### Foto 13 Bangunan Sekolah Gunung Puyuh



Sumber: Dokumentasi Wawan Hernawan, 9 Februari 2013

Keterangan: Komplek Yaspi Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi Peninggalan K. H. Ahmad Sanoesi. Bangunan ini masih dipertahankan keasliannya.

### Foto 14 Mesjid Peninggalan K.H. Ahmad Sanoesi



Sumber: Dokumentasi Wawan Hernawan, 9 Februari 2013

Keterangan: Di sini letak bangunan mesjid lama, namun sudah dipugar dan tidak dipertahankan bangunan aslinya, kecuali *mihrobnya*.

Lampiran 2:

Anggaran Dasar Persatuan Ummat Islam tahun 1954

ANGGARAN DASAR  
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

MUKADDIMAH:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُ غَايَتُنَا وَالْإِخْلَاصُ مَبْدَوُنَا وَالْإِصْلَاحُ سَبِيلُنَا وَالْمَحَبَّةُ  
شِعَارُنَا  
نُعَاهِدُ اللَّهَ عَلَى الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَطَلَبِ رِضَى اللَّهِ  
فِي الْعَمَلِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.  
اللَّهُ أَكْبَرُ

Pasal 1. NAMA, AQIDAH DAN KEDUDUKAN.

1. Perhimpunan ini bernama "PERSATUAN UMMAT ISLAM" disingkat "PUI" yang merupakan peleburan (fusi) dua perhimpunan yaitu Persatuan Ummat Islam Indonesia" dan "Perikatan Ummat Islam" pada tanggal 5 April 1952 atau 9 Rajab 1371 Hijriyah; didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. "PERSATUAN UMMAT ISLAM" beraqidah Islamiyah.

3. "PERSATUAN UMMAT ISLAM" berkedudukan di tempat Pengurus Besar Harian, di Majalengka atau kemudian di tempat lain yang diputuskan Mu'tamar.

Pasal 2. A Z A S.

Perhimpunan ini berasaskan Islam.

Pasal 3. SIFAT.

Perhimpunan ini adalah organisasi adalah sosial, pendidikan dan da'wah yang mandiri (independent).

Pasal 4. TUJUAN.

Perhimpunan ini menuju terlaksananya Syari'ah Islamiyah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pasal 5. USAHA.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perhimpunan berusaha :

1. Mengajak dan menggembarakan Ummat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Memajukan pendidikan dan pengajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya.
3. Menyelenggarakan dan mempergiat da'watul-Islam.
4. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan ummat Islam dan masyarakatnya.
5. Membangun dan membina persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) untuk tercapainya persatuan dan kesatuan.
6. Bekerjasama dengan Badan/Lembaga dan Perhimpunan lain dalam mencapai tujuan perhimpunan.

Pasal 6. ANGGOTA.

1. Setiap orang Islam yang telah aqil-baligh dapat menjadi anggota perhimpunan.
2. Anggota terdiri dari: a. Anggota Biasa  
b. Anggota Kehormatan



3. Anggota berhenti karena :
  - a. Atas permintaan sendiri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan perhimpunan atau melakukan hal-hal yang merugikan perhimpunan.

#### Pasal 7. SUSUNAN PERHIMPUNAN.

Perhimpunan tersusun dari:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengurus Besar   | disingkat PB. |
| 2. Pengurus Wilayah | disingkat PW. |
| 3. Pengurus Daerah  | disingkat PD. |
| 4. Pengurus Cabang  | disingkat PC. |
| 5. Pengurus Ranting | disingkat PR. |

#### Pasal 8. SUSUNAN PENGURUS.

1. Pengurus Besar terdiri dari Dewan Harian, Majelis-Majelis, Pembantu Umum, Dewan Penasehat.
2. Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah masing-masing terdiri dari Dewan Harian, Majelis-Majelis, Pembantu Umum, dan Dewan Penasehat.
3. Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting masing-masing terdiri dari Dewan Harian, Majelis-Majelis dan Pembantu.

#### Pasal 9. PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

1. Pengurus Besar dipilih dan disahkan oleh Mukhtamar untuk 2 tahun.
2. Pengurus Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Besar.
3. Pengurus Daerah dipilih oleh Konferensi Daerah dan disahkan oleh Pengurus Besar.
4. Pengurus Cabang dipilih oleh Konferensi Cabang dan disahkan oleh Pengurus Wilayah.
5. Pengurus Ranting dipilih oleh Rapat Anggota dan disahkan oleh Pengurus daerah.

**Pasal 10. KEUANGAN DAN KEKAYAAN PERHIMPUNAN.**

1. Keuangan dan kekayaan perhimpunan diperoleh dari:
  - a. Uang Pangkal.
  - b. Iuran
  - c. Infaq dan sadaqah
  - d. Waqaf
2. Pengurus Besar menguasai seluruh kekayaan/waqaf perhimpunan.
3. Pengurus Besar mempertanggungjawabkan keuangan dan kekayaan perhimpunan kepada Mu'tamar; Pengurus Wilayah kepada Konferensi Wilayah; Pengurus Daerah kepada Konferensi Daerah; Pengurus Cabang kepada Konferensi Cabang dan Pengurus Ranting kepada Rapat Anggota.

**Pasal 11. SIDANG-SIDANG.**

1. Mu'tamar:
  - a. Mukhtamar Perhimpunan diadakan 2 (dua) tahun sekali.
  - b. Jika dianggap perlu dan penting dapat dilakukan Mukhtamar Luar Biasa.
  - c. Mukhtamar mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perhimpunan.
2. Sidang Pleno Pengurus Besar diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun atau atas permintaan Pengurus Besar Harian.
3. Konferensi, Rapat Wilayah dan Daerah.
  - a. Konferensi Besar dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Pengurus Besar apabila dipandang perlu. Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah masing-masing diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.
  - b. Rapat Lengkap Pengurus Wilayah dan daerah dapat diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh Dewan Hariannya masing-masing.

4. Konferensi Cabang dan Rapat Anggota.  
Konferensi Cabang dan Rapat Anggota diselenggarakan masing-masing dua tahun sekali.
5. Rapat Lengkap Pengurus Cabang dan pengurus Ranting masing-masing dapat diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh Pengurus Hariannya masing-masing.
6. Sahnya Sidang/Rapat.  
Sidang/Rapat dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta sidang/rapat yang berhak hadir.
7. Keputusan Sidang/Rapat dianggap sah bila disetujui oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 12. HAKSUARA.

1. Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah mempunyai hak suara yang sama di Mu'tamar.
2. Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mempunyai hak suara yang sama di dalam Konferensi Wilayah.
3. Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang mempunyai hak suara yang sama di dalam Konferensi Daerah.
4. Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting mempunyai hak suara yang sama di dalam Konferensi Cabang.
5. Anggota mempunyai hak suara yang sama dalam Rapat Anggota.
6. Jumlah Suara untuk Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting diatur lebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13. PERUBAHAN.

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Mu'tamar.

Pasal 14. PEMBUBARAN PERHIMPUNAN.

1. Perhimpunan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Mu'tamar yang khusus membicarakan soal itu dengan mendapat suara  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
2. Kekayaan perhimpunan setelah pembubaran akan diberikan kepada Badan/Lembaga yang diputuskan oleh Mu'tamar.

Pasal 15. PENUTUP.

1. Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Mu'tamar "PUI" ke-2 tanggal 29 *Dzulhijah* 1373/29 Agustus 1954 di Sukabumi. (Sidang ke-4 jam 12.50 WIB. Mulai berlaku pada hari pengesahan A. Dasar.

# RIWAYAT HIDUP PENULIS

## A. Data Diri

Nama : Wawan Hernawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 03 November 1970  
NIP : 197011031996031002  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ushuluddin UIN  
Sunan Gunung Djati Bandung  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IV a  
Alamat:  
1. Kantor : Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru  
Bandung 40614 Tlp. 022 7800525  
Fax. 022 7802274  
Web. [http:// www.fu.uinsgd. ac.id.](http://www.fu.uinsgd.ac.id)  
2. Rumah : Bumi Panyileukan B. IX No. 22  
RT.05/02 Kel. Cipadung Kidul  
Panyileukan Kota Bandung  
Telepon/HP : 022 7811257/08122222694

## B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang	Nama Tempat Pendidikan/Sekolah	Jurusan	Tahun	
				Masuk	Lulus
1.	SD	SDN Cilangkap II	-	1976	1983
2.	SLTP	MTs. Asyrofuddin Cipicung	-	1983	1986
3.	SLTA	PGAN Sumedang	A (guru agama)	1986	1989
4.	S 1	IAIN Sunan Gunung Djati Bandung	Perbandingan Agama	1989	1994
5.	S 2	IAIN Imam Bonjol Padang	Pemikiran Islam	1996	1998
6.	S 3	Universitas Padjadjaran Bandung	Ilmu Sejarah	2010	-

## C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Pengajar Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1996- sekarang),
2. Divisi Perpustakaan Laboratorium Fakultas Ushuluddin (2000-2003),
3. Ketua Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin (2007-2011),
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ushuluddin (2011-2015).

## A. Data Keluarga

1. Nama Ayah : Mohammad Soehadma (*Almarhum*)
2. Nama Ibu : Rumsih Tedjaningrum (*Almarhumah*)
3. Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
4. Nama Isteri : Ihah Ash-Shobiechatul Choiriyah
5. Nama Anak : Dinda Bestari Khairunnisa'

## B. Data Organisasi (terkait Persatuan Ummat Islam)

1. Anggota Bidang Humas dan Dakwah PW PUI Jawa Barat (2001-2006),
2. Pembina PW Pemuda PUI Jawa Barat (2006-2009),
3. Sekretaris PW PUI Jawa Barat (2006-2011),
4. Redaktur Jurnal Intisabi PW PUI Jawa Barat (2006-2011),
5. Sekretaris Forum Kajian Intisabi PW PUI Jawa Barat (2007-2011),
6. Redaktur Tabloid Wahda PP PUI (2007-2008),
7. Redaktur Jurnal Wahda PP PUI (2008-2009),
8. Sekretaris Dewan Pembina Forum Guru dan Dosen PUI (2009-2011),
9. Badan Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Intisabi Sumedang (2009),
10. Sekretaris Dewan Pertimbangan DPW PUI Jawa Barat (2011-2016).

## C. Karya

### f.1 Penelitian Terkait Persatuan Ummat Islam

Judul Penelitian	Tahun
Corak Pemikiran Kalam K.H. Abdul Halim. Tesis. Padang: IAIN Imam Bonjol.	1998
Teologi K.H. Abdul Halim. Bandung: Pusat Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	2007
Persjarian Oelama dan Al-Ittihadijatoel Islamijjah: Analisis Historis Organisasi Cikal Bakal Persatuan Ummat Islam (1911-1952). Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	2013

## f.2 Buku/Jurnal/Tabloid/Makalah Terkait Persatuan Ummat Islam

Judul	Tahun
"K.H. Abdul Halim: Hidup dan Perjuangannya", dalam <i>Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya</i> . Bandung: Fakultas Ushuluddin.	2004
<i>Teologi K.H. Abdul Halim: Ikhtiar Melacak Akar-akar Pemikiran Teologi Organisasi Massa Islam Persatuan Ummat Islam (PUI)</i> . Bandung: PW PUI Jawa Barat.	2007
"Kalah atau Menang, PUI Menang" dalam <i>Wahda Tabloid Media Pemersatu Ummat Islam</i> . Jakarta: PP PUI.	2008
"Free Will dan Predestination menurut K.H. Abdul Halim", dalam <i>Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya</i> . Bandung: Fakultas Ushuluddin.	2008
"K.H. Abdul Halim Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam dari Majalengka", dalam Buletin <i>Intisabi Ikhlas Berani Tegas</i> . Bandung: PW PUI Jawa Barat.	2008
"Gelar Pahlawan Nasional untuk K.H. Abdul Halim", dalam Buletin <i>Intisabi Ikhlas Berani Tegas</i> . Bandung: PW PUI Jawa Barat.	2009
"Riwayat Aktivitas K.H. Abdul Halim Tokoh Pendiri Persatuan Ummat Islam (PUI)", dalam <i>Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya</i> . Bandung: Fakultas Ushuluddin.	2010
"Abdul Halim and His Movement: Seeking Historical Roots of Persatuan Ummat Islam (PUI) Movement", dalam <i>International Journal of Islamic Khazanah</i> . Bandung: Pascasarjana UIN Bandung.	2013
"Ahmad Sanoesi (1888-1950): Penggerak Organisasi Al-Ittihadijatoel Islamijjah (AII), dalam Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung (BPNB).	2013





ISBN 978-602-7859-09-8



9 786027 859098